



RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINKESPPKB)

KABUPATEN PURBALINGGA

2025–2029



Laman Web Kami
dinkes.purbalinggakab.go.id



Kontak Kami
(0281) 891034



[dinkespurbalingga](https://www.instagram.com/dinkespurbalingga)



dkk@purbalinggakab.go.id





**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 145);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD dan RPJMN.
20. Sasaran RPJMD adalah rangkaian kinerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
21. Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
22. Sasaran Renstra PD adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
23. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
25. Strategi RPJMD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
26. Strategi PD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
27. Arah Kebijakan RPJMD adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategis dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
28. Arah Kebijakan Renstra PD adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.
29. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.
30. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

31. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
32. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
33. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
34. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD.
35. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
36. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
37. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
38. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-1 (satu) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renstra PD merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rancangan RKPd.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan Menyusun Renstra PD terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;

- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
- o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- p. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
- q. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- r. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- s. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- t. Badan Keuangan Daerah;
- u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- w. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- x. Kecamatan Kemangkon;
- y. Kecamatan Bukateja;
- z. Kecamatan Kejobong;
- aa. Kecamatan Kaligondang;
- bb. Kecamatan Purbalingga;
- cc. Kecamatan Kalimanah;
- dd. Kecamatan Kutasari;
- ee. Kecamatan Mrebet;
- ff. Kecamatan Bobotsari;
- gg. Kecamatan Karangreja;
- hh. Kecamatan Karanganyar;
- ii. Kecamatan Karangmoncol;
- jj. Kecamatan Rembang;
- kk. Kecamatan Bojongsari;
- ll. Kecamatan Padamara;
- mm. Kecamatan Pengadegan;
- nn. Kecamatan Karangjambu; dan
- oo. Kecamatan Kertanegara.

(3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD;
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal Renstra PD Tahun 2025-2029 belum tersusun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2021-2026 dengan tetap mengacu pada RPJPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Sep 25

BUPATI PURBALINGGA,



FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025-2029, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025-2029;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
16. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
18. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
19. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
20. Badan Keuangan Daerah;
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Kecamatan Kemangkon;
25. Kecamatan Bukateja;
26. Kecamatan Kejobong;
27. Kecamatan Kaligondang;
28. Kecamatan Purbalingga;
29. Kecamatan Kalimanah;
30. Kecamatan Kutasari;
31. Kecamatan Mrebet;
32. Kecamatan Bobotsari;
33. Kecamatan Karangreja;
34. Kecamatan Karanganyar;
35. Kecamatan Karangmoncol;
36. Kecamatan Rembang;
37. Kecamatan Bojongsari;
38. Kecamatan Padamara;
39. Kecamatan Pengadegan;
40. Kecamatan Karangjambu; dan
41. Kecamatan Kertanegara.

BAB III
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Akselerasi Pembangunan Kolaboratif Untuk Purbalingga Mandiri Dan Sejahtera".

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,



FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dapat tersusun dengan baik.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan OPD yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah.

Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 mengharuskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing berpedoman pada dokumen tersebut.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Purbalingga selama periode 2025-2029. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan arah kebijakan pembangunan kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan mampu menjadi pedoman strategis yang terintegrasi, efektif, dan tepat sasaran dalam mewujudkan masyarakat Purbalingga yang sehat, mandiri, dan berdaya saing.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat dan kompleks serta terkadang tidak terduga. Untuk itu peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan menjadi sangat penting dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi di Kabupaten Purbalingga. Program-program pembangunan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga, diarahkan untuk pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan dan pencegahan pengendalian penyakit serta meningkatkan pengembangan upaya promotif dan preventif dengan meningkatkan

pemberdayaan masyarakat serta peran serta seluruh pelaku kesehatan. Di sisi lain juga dilaksanakan upaya pengendalian penduduk dan upaya peningkatan kualitas keluarga sehingga diharapkan seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan manusia dapat saling bahu membahu dalam implementasi program guna mendukung visi dan misi bupati-wakil bupati terpilih terutama misi keempat yaitu Unggulkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Kami senantiasa mengharap saran dan masukan guna perbaikan Renstra ini, sehingga dokumen ini bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang bermanfaat tidak saja bagi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga dan UPTD Puskesmas dan Laboratorium Daerah; tetapi juga bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas terkait serta seluruh stakeholder dalam upaya pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Purbalingga tahun 2025-2029. Semoga upaya kita bersama dalam mewujudkan kesehatan paripurna di Purbalingga mendapatkan rahmat, hidayah dan ridhoNya.

Purbalingga, 15 September 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPETAN PURBALINGGA


dr. JUSTI FEBRIANTO, MPH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700219 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	viii
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	64
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan	70
2.1.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	71
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	73
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	73
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	78
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	80
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	80
3.1.1 Tujuan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga.....	80
3.1.2 Sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga.....	81
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	85
3.2.1 Strategi.....	85
2.2.2 Arah Kebijakan	85

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
BIDANG URUSAN	90
4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	90
4.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah	172
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	175
BAB V PENUTUP	182

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga18

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.....	18
Tabel 2. 2	Jumlah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Menurut Persebaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.....	20
Tabel 2. 3	Puskesmas dan Jumlah Puskesmas Pembantu di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.....	24
Tabel 2. 4	Status Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024....	25
Tabel 2. 5	Rumah Sakit di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.....	26
Tabel 2. 6	Klinik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.....	26
Tabel 2. 7	Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.....	28
Tabel 2. 8	Sarana Kefarmasian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	29
Tabel 2. 9	Poliklinik Kesehatan Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	30
Tabel 2. 10	Posbindu PTM di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	31
Tabel 2. 11	Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.....	33
Tabel 2. 13	Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga	59
Tabel 2. 14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga	64
Tabel 2. 14	Kerja Sama yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	75
Tabel 2. 15	Pencapaian Kinerja pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga.....	66
Tabel 2. 16	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga.....	66
Tabel 2. 17	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan	71
Tabel 2. 18	Kerja Sama yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.....	73
Tabel 2. 19	Permasalahan Pelayanan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga.....	74

Tabel 2. 20	Isu Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga	79
Tabel 3. 1	Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga	83
Tabel 3. 2	Tahapan Strategi Dalam Rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga	86
Tabel 3. 3	Arah Kebijakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga	87
Tabel 4. 1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga	92
Tabel 4. 2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga	136
Tabel 4. 3	Program Prioritas Pembangunan Daerah	174
Tabel 4. 4	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga	179

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1	Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	36
Grafik 2. 2	Tren Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	37
Grafik 2. 3	Tren Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	38
Grafik 2. 4	Penyebab Kematian Bayi (29-11 bln) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	38
Grafik 2. 5	Tren Angka Kematian Balita (AKBA) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	39
Grafik 2. 6	Penyebab Kematian Balita (12-59 bulan) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	40
Grafik 2. 7	Tren Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	41
Grafik 2. 8	Rasio daya Tampung Rumah Sakit Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	42
Grafik 2. 9	Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	44
Grafik 2. 10	Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	45
Grafik 2. 11	Capaian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	46
Grafik 2. 12	Capaian Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	47
Grafik 2. 13	Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	48
Grafik 2. 14	Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	49
Grafik 2. 15	Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	50
Grafik 2. 16	Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi seusia Standar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	51

Grafik 2. 17	Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	52
Grafik 2. 18	Capaian Pelayanan Kesehatan pada ODGJ Berat Sesuai Standar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	53
Grafik 2. 19	Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC Sesuai Standar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	55
Grafik 2. 20	Capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko HIV Sesuai Standar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	56
Grafik 2. 21	Prevalensi Stunting di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi setiap orang yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Undang-undang ini juga mengamanatkan transformasi kesehatan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pemanfaatan teknologi, serta optimalisasi pembiayaan kesehatan.

Dengan adanya UU No. 17 Tahun 2023, perencanaan strategis di bidang kesehatan diharapkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi, seperti meningkatnya beban penyakit menular dan tidak menular, perubahan demografi dan epidemiologi, serta kesenjangan akses layanan kesehatan antar wilayah dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan Renstra ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya sistem kesehatan yang tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika global maupun nasional.

Selain regulasi tersebut di atas, Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengatur berbagai aspek dalam mewujudkan Keluarga Berencana, termasuk pengendalian kelahiran, usia ideal menikah dan melahirkan, serta jumlah dan jarak anak untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Dasar hukum ini diperkuat oleh peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang mengatur pelaksanaan programnya

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 disusun sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga 2025-2029 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Kabupaten dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) nya dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga didasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokok pikiran visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga, terutama misi 4 yaitu Unggulkan kualitas Sumber Daya Manusia. Penyusunan Renstra juga mempertimbangkan kondisi kesenjangan gender guna memastikan terpenuhinya prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga memiliki kemanfaatan yang signifikan bagi pelayanan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana termasuk Unit Pelaksana Teknis, Balai Penyuluh dan Rumah Sakit Daerah. Dokumen ini menjadi pedoman strategis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program kesehatan sehingga semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan jangka menengah dan kebijakan nasional. Dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas, Renstra diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta mendukung tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas keluarga.

Selain itu, Renstra mendorong sinergi antara berbagai program pembangunan di tingkat daerah dan nasional. Hal ini memfasilitasi kolaborasi antara Dinas, UPT, Rumah Sakit Daerah, Balai Penyuluh dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan peningkatan kualitas keluarga. Dokumen ini juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas bagi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dalam melaporkan kinerja kepada pemerintah daerah dan masyarakat sehingga menciptakan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program kesehatan dan peningkatan kualitas keluarga.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2045
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman arah pembangunan kesehatan daerah selama lima tahun ke depan. Renstra ini berfungsi untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi antara kebijakan pembangunan kesehatan dan peningkatan kualitas keluarga di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana disusun sebagai dasar dalam perumusan rencana kerja tahunan (Renja), menetapkan sasaran dan indikator kinerja yang terukur, serta mewujudkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga ke dalam program dan kegiatan periode Tahun 2025-2029.
2. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga dan rencana kerja lima tahunan.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai ketentuan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, sistematika Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menggambarkan tentang gambaran pelayanan Perangkat Daerah diantaranya tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; sumber daya Perangkat Daerah; kinerja pelayanan Perangkat Daerah; kelompok sasaran layanan. Bab ini memuat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disertai indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya. Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga. IKU merupakan indikator tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada Bab III. Selain IKU Dinas Kesehatan juga ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing yang telah ditetapkan. Selain IKU dan IKK dalam bab ini juga ditambahkan tabel indikator.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Keberadaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah meliputi:

- a. Sub Urusan Upaya Kesehatan, yaitu:
 - 1) Pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan rujukan tingkat daerah;
 - 2) Pengelolaan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan rujukan tingkat daerah ;
 - 3) Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas kesehatan tingkat daerah;
- b. Sub Urusan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, yaitu:
 - 1) Penerbitan rekomendasi izin praktik tenaga kesehatan;
 - 2) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP daerah.
- c. Sub Urusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan makanan minuman yaitu:
 - 1) Penerbitan rekomendasi izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
 - 2) Penerbitan rekomendasi izin usaha mikro obat tradisional (UMOT);

- 3) Penerbitan sertifikat penyuluhan keamanan pangan (PKP) produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
 - 4) Pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga.
- d. Sub Urusan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yaitu pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah.
 - e. Sub Urusan Pengendalian Penduduk
 - f. Sub Urusan Keluarga Berencana
 - g. Selain mempunyai tugas di atas, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Kesehatan dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi Bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Informasi, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi Bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Informasi, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi Bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan

- sumber daya kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Informasi, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- e. Pelaksanaan administrasi, UOBF dan UOBKi kesekretariatan Dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 85 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga menyebutkan bahwa Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi membawahi:

- a. Sekretariat
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- f. UPTD, UOBF, dan UOBK; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Adapun tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Sub Koordinator adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat
 - 1) Tugas:

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan dan Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DINKESPPKB).
 - 2) Fungsi:
 - a) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan DINKESPPKB;
 - b) Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DINKESPPKB;

- c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), reformasi birokrasi, dan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan DINKESPPKB;
- e) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DINKESPPKB;
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan dan bidang Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana; dan
- h) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Keuangan;
- c) Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Keuangan;
- d) Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran di lingkungan DINKESPPKB;
- e) Menyiapkan bahan dan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan DINKESPPKB;

- f) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan DINKESPPKB;
- g) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan di lingkungan DINKESPPKB;
- h) Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi di lingkungan DINKESPPKB;
- i) Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran di lingkungan DINKESPPKB;
- j) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Perencanaan dan Keuangan;
- k) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Keuangan; dan
- l) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian.

Dalam menjalankan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- c) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- d) Menyiapkan bahan dan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan DINKESPPKB;
- e) Menyiapkan bahan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan DINKESPPKB;
- f) Menyiapkan bahan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan aset di lingkungan DINKESPPKB;
- g) Menyiapkan bahan dan fasilitasi kerjasama dan kehumasan di lingkungan DINKESPPKB;

- h) Menyiapkan bahan dan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan DINKESPPKB;
- i) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan DINKESPPKB;
- j) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- k) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- l) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Kesehatan Masyarakat

1) Tugas:

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer, serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat.

2) Fungsi:

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
- b) Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
- c) Pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- d) Pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- e) Pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;

- f) Fasilitasi tata Kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
 - g) Pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat pertama lainnya;
 - h) Fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada Kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
 - i) Penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
 - j) Penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
 - k) Perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - l) Pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
 - m) Pemberian bimbingan teknis pada UPTD, UOBF, dan UOBK di lingkungan DINKESPPKB;
 - n) Pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat; dan
 - o) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 1) Tugas:

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang surveilans, kekarantina kesehatan di wilayah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi dan penyehatan lingkungan.
 - 2) Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan Fungsi:
 - a) Pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan kooedinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - b) Pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan bencana;
 - c) Pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - d) Advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - e) Pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa dan imunisasi khusus;

- f) Pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- g) Koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
- h) Pengembangan inovasi / teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- i) Pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah dan Kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;
- j) Pelaksanaan deteksi dini dan respon / penanggulangan KLB / wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh;
- k) Pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- l) Pemberian bimbingan teknis pada UPTD, UOBF, dan UOBK di lingkungan DINKESPPKB;
- m) Pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- n) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

1) Tugas:

Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata Kelola dan mutu pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan.

2) Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan Fungsi:

- a) Pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawgelolaan perizinan pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;

- b) Fasilitasi tata Kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
- c) Pengelolaan audit medis / audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
- d) Pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran, dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, Kumpulan massa (mass gathering), dan situasi khusus lainnya;
- e) Fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- f) Pengelolaan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan;
- g) Pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan / atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan / atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
- h) Pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- i) Pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
- j) Pengawasan produk dan sarana produksi dan / atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- k) Pengembangan dan penguatan tata Kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- l) Peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- m) Pengelolaan pendanaan kesehatan;
- n) Perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- o) Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- p) Pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- q) Pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
- r) Pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- s) Pemberian bimbingan teknis pada UPTD, UOBF, dan UOBK di lingkungan DINKESPPKB;
- t) Pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumberdaya kesehatan; dan

- u) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Informasi, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 1) Tugas
Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Informasi, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pembatauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Informasi, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - 2) Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Informasi, serta Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan Fungsi:
 - a) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian penduduk;
 - b) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah;
 - c) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (KB) sesuai kearifan budaya local;
 - d) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendayagunaan tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)
 - e) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasespsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah;
 - f) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan peningkatan peran serta

organisasi kemasyarakatan Tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;

- g) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah dalam Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR); dan
- j) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

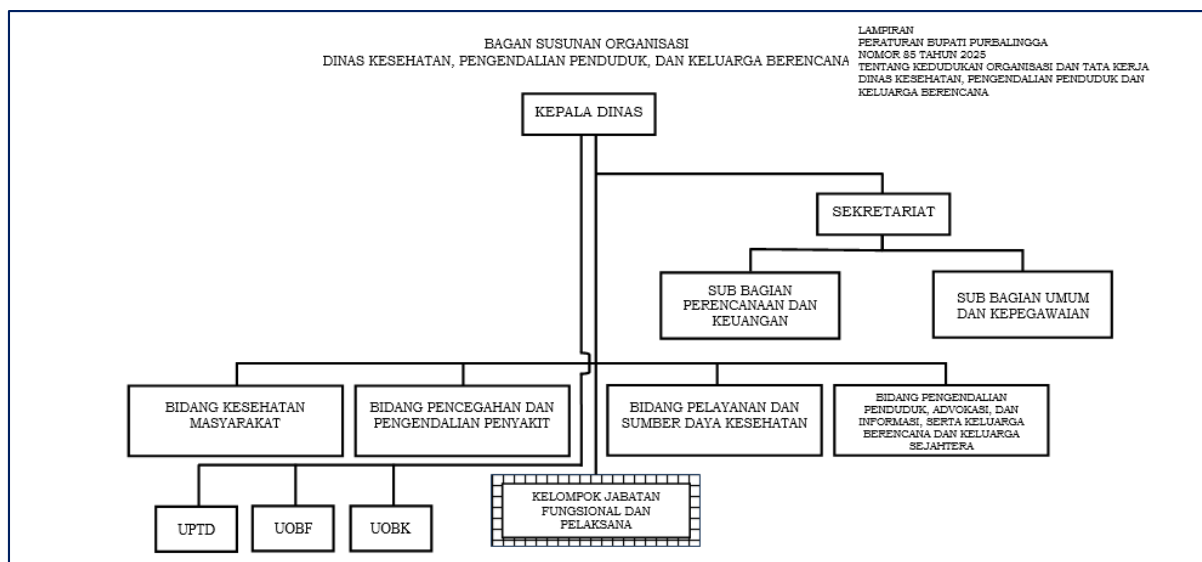
Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kedudukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga struktur organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- f. UPTD, UOBF dan UOBK
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Struktur organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga mendasarkan pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kedudukan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga



Sumber: Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kedudukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit serta 22 Puskesmas se-Kabupaten Purbalingga berdasarkan jenis ketenagaannya sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang di Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Jenis SDM	Laki-Laki	Perempuan	Total	%
1	2	3	4	5	6
1	Tenaga Medis				
	a. Dokter spesialis	78	45	123	2,49
	b. Dokter	96	152	248	
	c. Dokter Gigi Spesialis	3	3	6	5,01
	d. Dokter Gigi	8	47	55	1,11
2	Tenaga Kesehatan				
	a. Keperawatan	455	1014	1469	29,69
	b. Kebidanan	0	764	764	15,44
	c. Kesehatan Masyarakat	22	68	90	1,82

No	Jenis SDM	Laki-Laki	Perempuan	Total	%
1	2	3	4	5	6
	d. Kesehatan Lingkungan	19	38	57	1,15
	e. Gizi	4	54	58	1,17
	f. Keterampilan fisik	10	10	20	0,40
	g. Keteknisian Medis	41	130	171	3,46
	h. Teknik biomedika				
	1) ATLM	32	97	129	2,61
	2) Teknik biomedika lainnya	34	26	60	1,21
	i. Tenaga Kefarmasian	76	291	367	7,42
3	Tenaga Pendukung/Penunjang	694	637	1331	26,90
Total		1.572	3.376	4.948	

Sumber: SISDMK data hingga Desember 2024

Tabel 2. 2 Jumlah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Menurut Persebaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS			DOKTER			DOKTER GIGI			DOKTER GIGI SPESIALIS			TENAGA KEPERAWATAN			TENAGA KEBIDANAN	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P		L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Kemangkon	0	0	0	3	2	5	0	1	1	0	0	0	5	5	10	22	0	3	3
2	Bukateja	0	0	0	2	1	3	1	0	1	0	0	0	3	13	16	13	0	3	3
3	Kutawis	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	3	5	8	12	0	2	2
4	Kejobong	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	9	17	26	21	0	2	2
5	Pengadegan	0	0	0	1	2	3	0	1	1	0	0	0	4	3	7	16	1	4	5
6	Kaligondang	0	0	0	3	7	10	0	1	1	0	0	0	10	3	13	19	1	1	2
7	Kalikajar	0	0	0	1	2	3	0	1	1	0	0	0	4	3	7	11	0	2	2
8	Purbalingga	0	0	0	0	4	4	0	1	1	0	0	0	1	6	7	13	0	2	2
9	Bojong	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	6	5	11	10	0	1	1
10	Kalimanah	0	0	0	0	3	3	0	1	1	0	0	0	6	8	14	18	0	2	2
11	Padamara	0	0	0	2	1	3	0	1	1	0	0	0	5	9	14	25	0	3	3
12	Kutasari	0	0	0	1	3	4	0	1	1	0	0	0	3	7	10	19	0	2	2
13	Bojongsari	0	0	0	3	6	9	0	1	1	0	0	0	6	4	10	23	2	1	3
14	Mrebet	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	5	9	14	20	1	3	4
15	Serayu Larangan	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	0	0	6	8	14	24	2	2	4
16	Bobotsari	0	0	0	1	2	3	0	1	1	0	0	0	8	12	20	26	0	2	2
17	Karangreja	0	0	0	1	2	3	0	1	1	0	0	0	1	12	13	22	0	1	1
18	Karangjambu	0	0	0	0	3	3	1	0	1	0	0	0	6	6	12	11	1	2	3
19	Karanganyar	0	0	0	0	3	3	0	1	1	0	0	0	13	12	25	24	1	2	3
20	Karantengah	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	3	3	6	19	0	3	3
21	Karangmoncol	0	0	0	2	2	4	0	1	1	0	0	0	7	13	20	28	1	2	3

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS			DOKTER			DOKTER GIGI			DOKTER GIGI SPESIALIS			TENAGA KEPERAWATAN			TENAGA KEBIDANAN	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P		L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	Rembang	0	0	0	0	3	3	1	0	1	0	0	0	7	14	21	29	0	2	2
1	RSUD dr. R. Goeteng T	24	16	40	13	19	32	0	1	1	1	1	2	96	191	287	61	1	1	2
2	RSUD Panti Nugroho	12	4	16	2	14	16	0	2	2	1	0	1	32	55	87	45	2	0	2
3	RSU Harapan Ibu	10		10	10	4	14	0	3	3	1	1	2	33	131	164	25	1	0	1
4	RSIA Ummu Hani	11	7	18	1	10	11	0	0	0	0	0	0	24	93	117	48	0	0	0
5	RSU Siaga Medika	22	9	31	11	8	19	0	2	2	1	1	2	70	124	194	33	0	0	0
6	RSU Nirmala	11	4	15	7	7	14	0	1	1	0	0	0	22	80	102	8	0	0	0
7	RSU PKU Muhammadiyah	13	6	19	1	8	9	0	0	0	1	0	1	25	54	79	13	0	1	1
8	RSI At-Tin Husada	9	6	15	3	8	11	0	0	0	1	0	1	11	53	64	10	0	0	0
9	RSIA MPH Purbalingga	3	4	7	3	6	9	0	0	0	0	0	0	0	10	10	5	0	1	1
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN		6	6	12	70	98	168	11	39	50	6	6	12	96	128	224	354	10	30	40
JUMLAH (KAB/KOTA) ^a		78	45	123	96	152	248	8	47	55	3	3	6	455	1.014	1.469	764	22	68	90
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK				11,9			23,9			5,3			0,6			141,6	73,6			8,7

Sumber: SISDMK data hingga Desember 2024

Keterangan :

- Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah paska sarjana dan doktor
- Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NO	UNIT KERJA	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN			TENAGA GIZI			AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK			TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAINNYA			KETERAPIAN FISIK			KETEKNISIAN MEDIS			TENAGA KEFARMASIAN		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	Kemangkon	0	2	2	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2
2	Bukateja	0	1	1	0	1	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2
3	Kutawis	0	1	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2
4	Kejobong	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	2
5	Pengadegan	1	2	3	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2
6	Kaligondang	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	3
7	Kalikajar	0	1	1	1	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
8	Purbalingga	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3
9	Bojong	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2
10	Kalimanah	1	0	1	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	3
11	Padamara	1	0	1	1	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3
12	Kutasari	1	2	3	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3
13	Bojongsari	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	2
14	Mrebet	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2
15	Serayu Larangan	0	1	1	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
16	Bobotsari	1	1	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	2
17	Karangreja	0	1	1	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	2	2
18	Karangjambu	1	1	2	1	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1
19	Karanganyar	0	1	1	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2
20	Karangtengah	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
21	Karangmoncol	0	1	1	0	2	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	2	2
22	Rembang	1	0	1	1	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1
1	RSUD dr. R. Goeteng T	1	1	2	10	0	10	7	9	16	11	6	17	4	1	5	10	23	33	6	25	31

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NO	UNIT KERJA	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN			TENAGA GIZI			AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK			TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAINNYA			KETERAPIAN FISIK			KETEKNISIAN MEDIS			TENAGA KEFARMASIAN		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
2	RSUD Panti Nugroho	0	3	3	0	2	2	2	8	10	2	3	5	0	0	0	5	17	22	5	12	17
3	RSU Harapan Ibu	0	1	1	0	4	4	2	5	7	2	5	7	2	2	4	6	8	14	4	27	31
4	RSIA Ummu Hani	0	1	1	0	2	2	2	7	9	2	1	3	0	0	0	1	6	7	3	14	17
5	RSU Siaga Medika	2	0	2	0	2	2	0	10	10	6	4	10	2	2	4	0	7	7	8	16	24
6	RSU Nirmala	1	0	1	1	0	1	2	3	5	3	1	4	0	2	2	1	2	3	0	10	10
7	RSU PKU Muhammadiyah	0	1	1	1	0	1	2	5	7	3	3	6	0	1	1	0	2	2	2	8	10
8	RSI At-Tin Husada	0	1	1	1	0	1	3	5	8	4	3	7	1	0	1	3	6	9	2	4	6
9	RSIA MPH Purbalingga	0	1	1			0	1	1	2	0	2	2	0	0	0	1	1	2	0	3	3
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN		9	9	18	2	8	10	4	17	21	0	0	0	2	5	7	9	21	30	58	202	260
JUMLAH (KAB/KOTA) ^a		19	38	57	4	54	58	32	97	129	34	26	60	10	10	20	41	130	171	76	291	367
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK				5,5			5,6			12,4			5,8			1,9			16,5			35,4

Sumber: SISDMK data hingga Desember 2024

Keterangan :

- Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah paska sarjana dan doktor
- Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

2. Sarana Kesehatan

a. Puskesmas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menyebutkan bahwa puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.

Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya. Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.

Di Kabupaten Purbalingga jumlah Puskesmas sebanyak 22 unit yang terdiri dari Puskesmas Non Rawat Inap 11 unit dan Puskesmas dengan Rawat Inap 11 unit. Puskesmas dengan Rawat Inap meliputi: Puskesmas Bukateja, Puskesmas Kejobong, Puskesmas Kalimanah, Puskesmas Padamara, Puskesmas Serayu Larangan, Puskesmas Bobotsari, Puskesmas Karangreja, Puskesmas Karangjambu, Puskesmas Karanganyar, Puskesmas Karangmoncol dan Puskesmas Rembang. Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu di Kabupaten Purbalingga sebanyak 47 unit.

Tabel 2. 3 Puskesmas dan Jumlah Puskesmas Pembantu di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Nama Puskesmas	Status	Jumlah Pustu
1	2	3	4
1	Kemangkong	Non Rawat Inap	3
2	Bukateja	Rawat Inap	2
3	Kutawis	Non Rawat Inap	2
4	Kejobong	Rawat Inap	2
5	Pengadegan	Non Rawat Inap	3
6	Kaligondang	Non Rawat Inap	3
7	Kalikajar	Non Rawat Inap	0
8	Purbalingga	Non Rawat Inap	0
9	Bojong	Non Rawat Inap	1
10	Kalimanah	Rawat Inap	3
11	Padamara	Rawat Inap	3
12	Kutasari	Non Rawat Inap	1

No	Nama Puskesmas	Status	Jumlah Pustu
1	2	3	4
13	Bojongsari	Non Rawat Inap	3
14	Mrebet	Non Rawat Inap	2
15	Serayu Larangan	Rawat Inap	2
16	Bobotsari	Rawat Inap	3
17	Karangreja	Rawat Inap	2
18	Karangjambu	Rawat Inap	2
19	Karanganyar	Rawat Inap	2
20	Karangtengah	Non Rawat Inap	3
21	Karangmoncol	Rawat Inap	3
22	Rembang	Rawat Inap	3

Sumber: Data Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2024

Setiap Puskesmas wajib dilakukan akreditasi. Akreditasi dilakukan paling lambat setelah Puskesmas beroperasi (2 (dua) tahun sejak memperoleh perizinan berusaha untuk pertama kali. Setiap Puskesmas yang telah terkreditasi wajib dilakukan akreditasi kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahun. Berikut ini merupakan hasil capaian status akreditasi Puskesmas tahun 2024 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Status Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Puskesmas	Status Akreditasi			
		Paripurna	Utama	Madya	Dasar
1	2	3	4	5	6
1	Kemangkong	Paripurna			
2	Bukateja			Madya	
3	Kutawis	Paripurna			
4	Kejobong	Paripurna			
5	Pengadegan		Utama		
6	Kaligondang	Paripurna			
7	Kalikajar	Paripurna			
8	Purbalingga	Paripurna			
9	Bojong	Paripurna			
10	Kalimanah	Paripurna			
11	Padamara	Paripurna			
12	Kutasari	Paripurna			
13	Bojongsari	Paripurna			
14	Mrebet	Paripurna			
15	Serayu Larangan	Paripurna			
16	Bobotsari	Paripurna			
17	Karangreja	Paripurna			
18	Karangjambu	Paripurna			
19	Karanganyar	Paripurna			
20	Karangtengah	Paripurna			
21	Karangmoncol	Paripurna			
22	Rembang	Paripurna			

Sumber: Data Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2024

b. Rumah Sakit

Kabupaten Purbalingga memiliki 9 (sembilan) Rumah sakit yang terdiri dari 7 (tujuh) Rumah sakit umum dan 2 (dua) Rumah Sakit Khusus. Jenis Pelayanan, Status Kepemilikan dan tipe kelas Rumah Sakit dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 5 Rumah Sakit di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

No	Nama Rumah Sakit	Status Kepemilikan	Jenis Pelayanan	Tipe Kelas	Akreditasi
1	2	3	4	5	6
1	RSUD Panti Nograho	Pem. Kab Purbalingga	RS Umum	C	Paripurna
2	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Pem. Kab Purbalingga	RS Umum	C	Paripurna
3	PKU Muhammadiyah Bobotsari	Swasta	RS Umum	D	Paripurna
4	RSU Siaga Medika	Swasta	RS Umum	C	Paripurna
5	RSU Harapan Ibu	Swasta	RS Umum	C	Paripurna
6	RSU Nirmala	Swasta	RS Umum	C	Paripurna
7	RS At-Tin	Swasta	RS Umum	C	Utama
8	RSIA Ummu Hani	Swasta	RS Khusus	C	Paripurna
9	RSIA Mitra Permata Husada (MPH)	Swasta	RS Khusus	C	Paripurna

Sumber: Data Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2024

c. Klinik

Kabupaten Purbalingga terdapat 24 Klinik, adapun klinik tersebut pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 6 Klinik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

NO	NAMA KLINIK	KELAS	PELAYANAN	AKREDITASI
1	2	3	4	5
1	Klinik Utama Rawat Inap H. Mustajab	Utama	Rawat Inap	Paripurna
2	Klinik Griya dr. U	Pratama	Non Rawat Inap	Paripurna
3	Klinik Nahdlatul Ulama Karangmoncol	Pratama	Non Rawat Inap	Paripurna
4	Klinik Sarza Medika	Pratama	Non Rawat Inap	Utama
5	Klinik Islam Siti Chotidjah	Pratama	Non Rawat Inap	Paripurna
6	Klinik Nahdlatul Ulama Kutasari	Pratama	Non Rawat Inap	Paripurna

NO	NAMA KLINIK	KELAS	PELAYANAN	AKREDITASI
1	2	3	4	5
7	Klinik Polres Purbalingga	Pratama	Non Rawat Inap	Paripurna
8	Klinik Klinikita	Pratama	Rawat Inap	Paripurna
9	Klinik Pratama Rawat Jalan Pmi Kabupaten Purbalingga	Pratama	Non Rawat Inap	Paripurna
10	Klinik Pratama Yonif 406	Pratama	Non Rawat Inap	Paripurna
11	Klinik Lanud Jenderal Besar Soedirman	Pratama	Non Rawat Inap	Paripurna
12	Klinik Flamboyan	Pratama	Rawat Inap	Paripurna
13	Klinik Abmi Medika	Pratama	Non Rawat Inap	Paripurna
14	Klinik Griya Medica	Pratama	Non Rawat Inap	Utama
15	Klinik Rawat Inap Kasih Medika	Pratama	Non Rawat Inap	Paripurna
16	Klinik Fadilah	Pratama	Non Rawat Inap	Paripurna
17	Klinik Edelweiss	Pratama	Non Rawat Inap	-
18	Klinik Hassya Medica	Pratama	Non Rawat Inap	Paripurna
19	Klinik Handayani Medica Kalimanah	Pratama	Non Rawat Inap	Paripurna
20	Klinik dr. Shalam	Pratama	Non Rawat Inap	Paripurna
21	Klinik Pratama BNN Kabupaten Purbalingga	Pratama	Non Rawat Inap	
22	Klinik NU Bukateja	Pratama	Non Rawat Inap	Paripurna
23	Klinik Mitra Permata Husada	Utama	Non Rawat Inap	Paripurna
24	Klinik Kartika 03	Pratama	Non Rawat Inap	Paripurna

Sumber: Data Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2024

d. Tempat Praktik Mandiri

Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter dan dokter gigi untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2024, terdapat 101 Tempat Praktik Mandiri Dokter, 21 Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, 2 Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis, 120 Tempat Praktik Mandiri Bidan.

e. Laboratorium Kesehatan

Kabupaten Purbalingga terdapat 3 laboratorium kesehatan, adapun laboratorium kesehatan tersebut pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 7 Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

NO	NAMA LABORATORIUM	JENIS	AKREDITASI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Laboratorium UTAMA	Laboratorium Medis Umum Pratama	Paripurna
2	UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Lab Medis Khusus Pratama	Paripurna
3	Laboratorium Klinik Prodia Cabang Purbalingga	Laboratorium Medis Khusus Pratama	-

Sumber: Data Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2024

f. Unit Transfusi Darah

Unit Tranfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Kabupaten Purbalingga memiliki 1 Unit Tranfusi Darah.

g. Sarana Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Sarana farmasi dan perbekalan kesehatan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Sarana Kefarmasian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

NO	SARANA	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1	Industri Farmasi	-	-	-
2	Industri Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alam (LOT/LEBA)	-	2	2
3	Usaha Kecil/Mikro Obat Tradisional (UKOT/UMOT)	-	-	-
4	Produksi Alat Kesehatan	-	-	-
5	Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	-	-	1
6	Industri Kosmetika	-	-	1
7	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	1	-	1
8	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	-	-
9	Apotek	94	101	111
10	Toko Obat	1	-	-
11	Toko Alkes	-	-	3

Sumber: Data Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2024

h. Posyandu

Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 terdapat Posyandu sebanyak 1.240 Posyandu. Dari 1.240 Posyandu keseluruhannya merupakan Posyandu aktif.

i. Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)

PKD merupakan pengembangan dari Pondok Bersalin Desa (Polindes), dengan berkembangnya Polindes menjadi PKD maka fungsinya juga bertambah. Disamping pelayanan kesehatan ibu dan anak, juga sebagai tempat untuk memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan masyarakat, melakukan pembinaan kader, pemberdayaan masyarakat serta forum komunikasi pembangunan kesehatan di desa, serta sebagai tempat memberikan pelayanan kesehatan dasar termasuk kefarmasian sederhana serta untuk deteksi dini dan penanggulangan pertama kasus gawat darurat.

Kabupaten Purbalingga tahun 2024 terdapat 189 PKD yang tersebar di seluruh kecamatan.

Tabel 2. 9 Poliklinik Kesehatan Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH PKD
1	2	3
1	Kemangkon	16
2	Bukateja	6
3	Kutawis	4
4	Kejobong	10
5	Pengadegan	7
6	Kaligondang	8
7	Kalikajar	8
8	Purbalingga	5
9	Bojong	3
10	Kalimanah	13
11	Padamara	14
12	Kutasari	12
13	Bojongsari	13
14	Mrebet	8
15	Serayu Larangan	7
16	Bobotsari	12
17	Karangreja	6
18	Karangjambu	3
19	Karanganyar	10
20	Karangtengah	8
21	Karangmoncol	8
22	Rembang	8
Jumlah		189

Sumber: Data Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 2024

j. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)

Pos pembinaan terpadu dibentuk sebagai upaya untuk mengurangi prevalensi penyakit tidak menular yang semakin hari semakin meningkat sehingga penderitanya tetap bisa menikmati hidup dengan seminimal mungkin ketergantungan dengan orang lain. Jumlah posbindu di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebanyak 418 buah yang tersebar di 22 Puskesmas. Berikut jumlah Posbindu PTM berdasarkan Puskesmas di Kabupaten Purbalingga:

Tabel 2. 10 Posbindu PTM di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

NO	NAMA PUSKEMAS	JUMLAH POSBINDU PTM
1	2	3
1	Kemangkon	21
2	Bukateja	7
3	Kutawis	31
4	Kejobong	14
5	Pengadegan	14
6	Kaligondang	10
7	Kalikajar	25
8	Purbalingga	17
9	Bojong	6
10	Kalimanah	35
11	Padamara	56
12	Kutasari	19
13	Bojongsari	14
14	Mrebet	12
15	Serayu Larangan	9
16	Bobotsari	50
17	Karangreja	18
18	Karangjambu	11
19	Karanganyar	13
20	Karangtengah	11
21	Karangmoncol	13
22	Rembang	12
Jumlah		418

Sumber: Data Promkes Dinkes kab Purbalingga, 2024

3. Sarana Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdapat prasarana Gedung Balai Penyuluh KB 18 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga

4. Jaminan Kesehatan Nasional

Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). Kelompok PBI adalah kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segmentasi kepesertaan PBI terbagi menurut jenis sumber pendanaan. Ada 2 (dua) jenis segmentasi kepesertaan PBI yaitu; 1) PBI APBN adalah kelompok peserta PBI yang sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Pusat); dan 2) PBI APBD Kabupaten adalah kelompok peserta PBI yang sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Segmentasi kepesertaan Non PBI terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu 1) Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah segmentasi kepesertaan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Karyawan swasta, BUMN, dan BUMD; 2) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan segmentasi kepesertaan yang mendaftarkan diri secara mandiri (pekerja informal); dan 3) Bukan Pekerja (BP) terdiri dari investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda duda atau anak yatim dari veteran atau perintis kemerdekaan.

Capaian Jaminan Kesehatan penduduk menurut jenis kepesertaan di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebagai berikut:

1. Jumlah kepesertaan PBI APBN 650.939 peserta atau sebesar 62,73%;
2. Jumlah kepesertaan PBI APBD 83.218 peserta atau sebesar 8,02%;
3. Jumlah kepesertaan Non PBI segmentasi Pekerja Penerima Upah (PPU) 206.856 atau sebesar 19,94%;
4. Jumlah kepesertaan Non PBI segmentasi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) / Mandiri 206.856 atau sebesar 8,76%;
5. Jumlah kepesertaan Bukan Pekerja (BP) 19.353 atau sebesar 1,87%

Jumlah kepesertaan PBI sebanyak 734.157 peserta atau sebesar 70,75% dan jumlah kepesertaan Non PBI sebanyak 317.136 atau sebesar 30,56% sehingga jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Purbalingga yang memiliki jaminan kesehatan sebanyak 1.051.293 atau sebesar 101,32%. Progres pencapaian *Universal Health Coverage* per Desember 2024 berdasarkan data BPJS Kesehatan adalah sebesar 99,85%

5. Total Fertility Rate (TFR) / Rata-rata Angka Kelahiran Total

Total Fertility Rate (TFR) merupakan parameter dalam pengukuran kesuksesan dalam pengendalian penduduk, Adapun capaian TFR di Kabupaten Purbalingga di tahun 2024 adalah sebesar 2,1 atau bisa diartikan bahwa

6. Pembiayaan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Anggaran kesehatan Kabupaten Purbalingga bersumber dari APBD Kabupaten/Kota yang berasal dari: 1) Dana Alokasi Umum (DAU); 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) dan; 3) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pada

tahun 2024, jumlah anggaran kesehatan Kabupaten Purbalingga sebesar Rp420.340.421.000,00 (19,6%) dari total APBD Kabupaten Purbalingga sebesar Rp2.145.035.432.000,00. Jumlah tersebut menurun dibanding pada tahun 2023 jumlah total anggaran kesehatan Kabupaten Purbalingga sebesar Rp424.392.016.000,00 (20,4%) dari total APBD kabupaten Purbalingga Rp2.079.205.449.000,00. Besarnya anggaran kesehatan perkapita di Kabupaten Purbalingga pada 2024 sebesar Rp203.718.779.070,00.

Tabel 2. 11 Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN	
		Rupiah	%
1	2	3	4
	ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER:		
1	APBD KAB/KOTA	Rp414.187.633.000,00	98,54
	a. Belanja Pegawai	Rp165.995.046.000,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp216.621.636.000,00	
	c. Belanja Modal	Rp2.548.024.000,00	
	d. Belanja Lainnya		
	e. Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp29.022.927.000,00	
	- DAK fisik	Rp2.100.000.000,00	
	1. Reguler		
	2. Penugasan	Rp2.100.000.000,00	
	3. Afirmasi		
	- DAK non fisik	Rp26.922.927.000,00	
	1. BOK	Rp26.922.927.000,00	
	2. Akreditasi		
	3. Jampersal		
	TOTAL ANGGARAN KESEHATAN	Rp420.340.421.000,00	
	TOTAL APBD KAB/KOTA	Rp2.145.035.432.000,00	
	% APBD KESEHATAN THD APBD KAB/KOTA		19,6
	ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA	Rp203.718.779.070,00	

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah.

Secara umum Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ikut berkontribusi dalam pencapaian peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungan, bidang kesehatan yang diukur dengan Usia Harapan Hidup.

2.1.3.1 Urusan Kesehatan

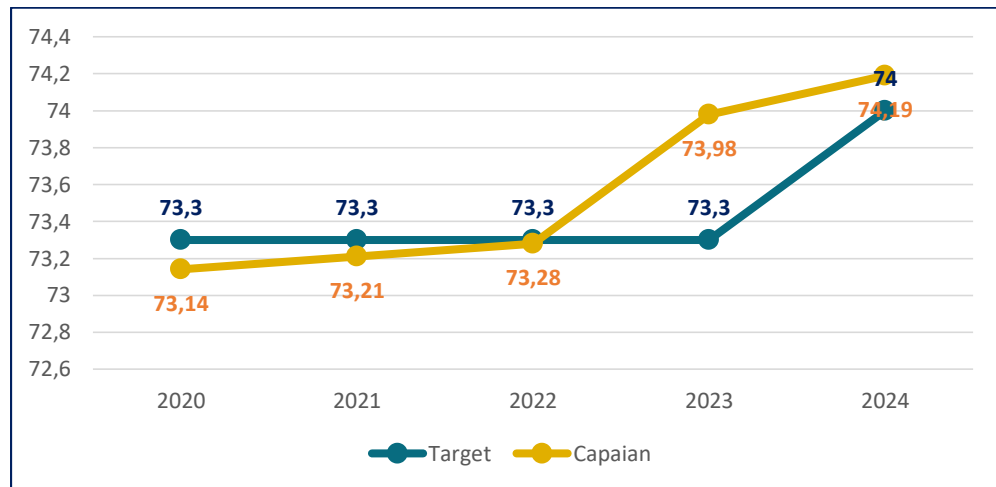
1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selama tahun 2020 hingga 2024 terjadi peningkatan UHH sebesar 1,05 tahun. Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga tahun 2024 menjadi 74,19 tahun, yang artinya pada tahun 2024 rata-rata umur bayi baru lahir diperkirakan akan hidup hingga 74,19 tahun. Capaian Kinerja jika dibandingkan terhadap Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah 100,94%. Tetapi jika dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah masih berada dibawah capaian Usia Harapan Hidup yaitu 74,91, namun masih lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yaitu 74,15 tahun.

Tren Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Purbalingga selama lima tahun dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Grafik 2. 1 Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga

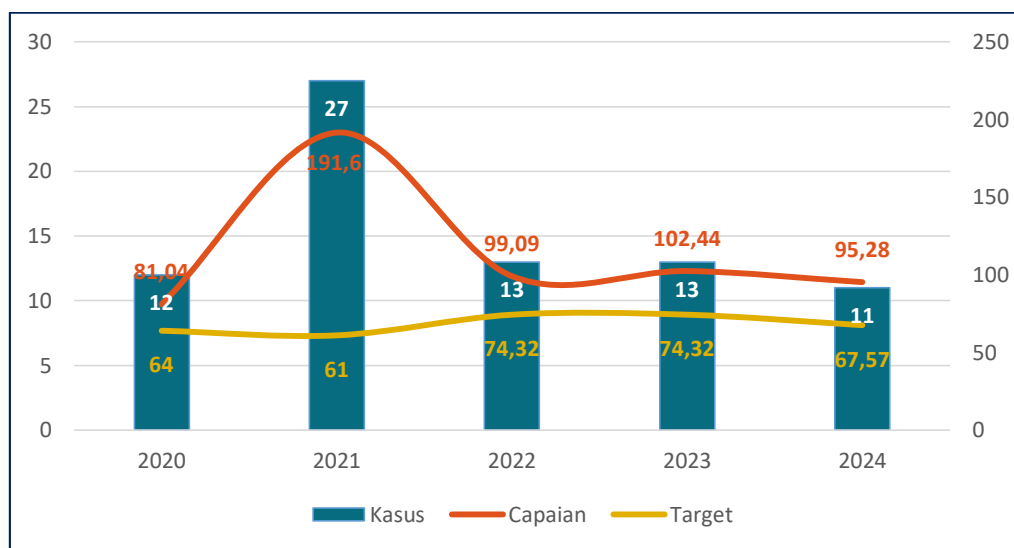
b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu faktor indikator dampak kegiatan kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu pada masa kehamilan, bersalin atau nifas, bukan karena kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 95,28 per 100.000 kelahiran hidup (11 kasus). Angka Kematian Ibu tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu tahun 2023 sebesar 102,44 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kasus tercatat 13 kasus.

Berikut gambaran AKI di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2. 2 Tren Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
KH	14808	14092	13120	12690	11545

Sumber: Kesga Gizi Dinkes Kab. Purbalingga, 2024

Menurut waktu kejadian kematian ibu maternal terjadi pada saat hamil sejumlah 3 kasus dan saat nifas sejumlah 8 kasus. Berdasarkan laporan rutin yang dilaporkan pada tahun 2024 ada 11 kasus kematian ibu dengan penyebab: Perdarahan 4 kasus, gangguan Hipertensi 2 kasus, Kelainan jantung & pembuluh darah 3 kasus, lainnya 2 kasus.

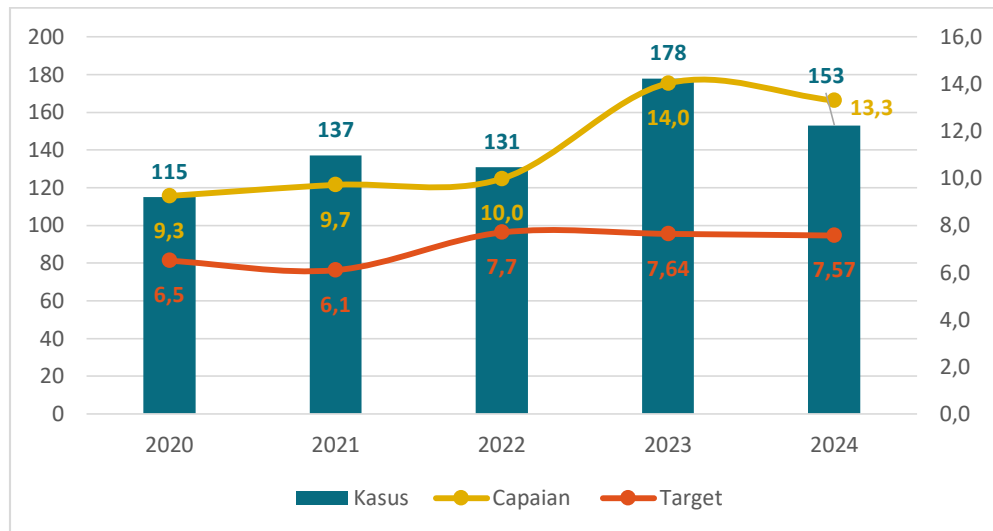
c. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian yang terjadi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Kematian bayi terdiri dari kematian neonatal (usia 0-28 hari) dan post neonatal (usia 29 hari-11 bulan).

Angka Kematian Bayi Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 13,3 (153 kasus) per 1.000 kelahiran hidup dan dibandingkan dengan tahun 2023 Angka Kematian Neonatal mengalami penurunan dari 14,0 (178 kasus) per 1.000 kelahiran hidup.

Berikut gambaran Angka Kematian Bayi di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2. 3 Tren Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024

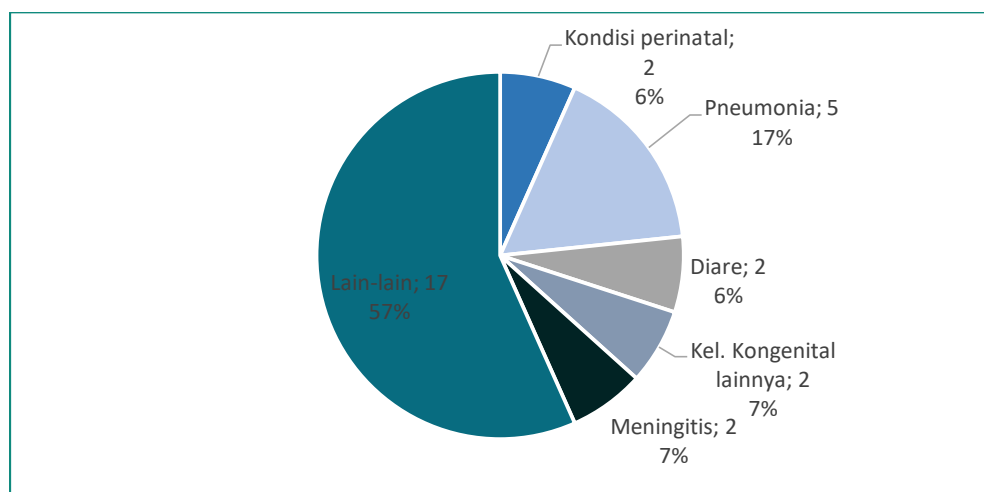


Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
KH	14808	14092	13120	12690	11545

Sumber: Kesga Gizi Dinkes Kab. Purbalingga, 2024

Kematian bayi tertinggi terdapat di wilayah kerja Puskesmas Karangmoncol sebanyak 14 kasus, sedangkan terendah terdapat di Puskesmas Bojong dan Puskesmas Kutawis dengan jumlah masing-masing kasus sebanyak 1 kasus. Proporsi penyebab kematian post neonatal (29 hari – 11 bulan) dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2. 4 Penyebab Kematian Bayi (29-11 bln) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024



Sumber: Kesga Gizi Dinkes Kab. Purbalingga, 2024

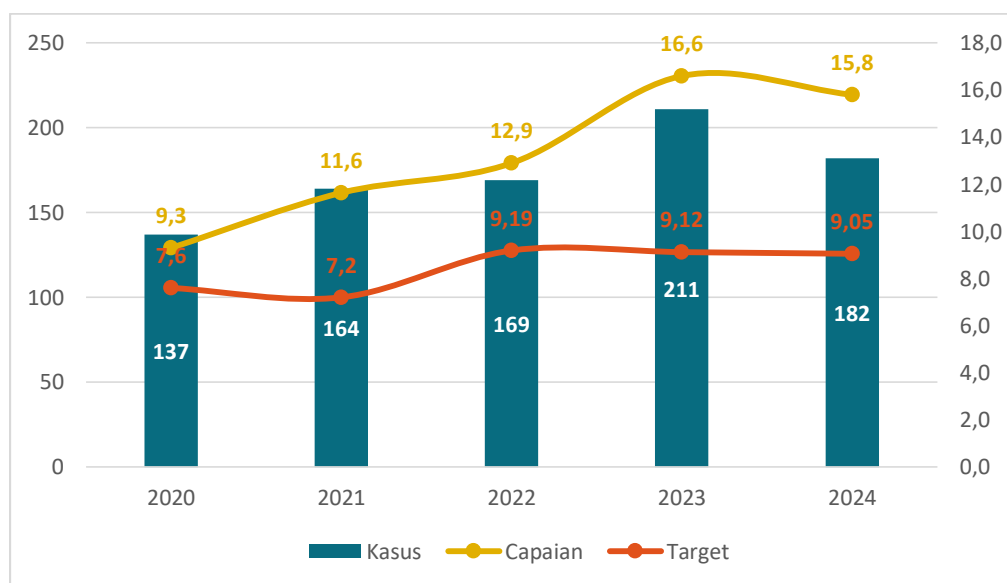
d. Angka Kematian Balita (AKBA)

Angka Kematian Balita (AKBA) merupakan jumlah balita usia 0-59 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah pada kurun waktu satu tahun. AKBA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA khususnya kesehatan anak Balita dan kondisi lingkungan yang mendukungnya.

Angka Kematian Balita Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebesar 15,8 (182 kasus) per 1.000 kelahiran hidup dan dibandingkan dengan tahun 2023 Angka Kematian Neonatal mengalami penurunan dari 16,6 (211 kasus) per 1.000 kelahiran hidup.

Berikut gambaran Angka Kematian Balita di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

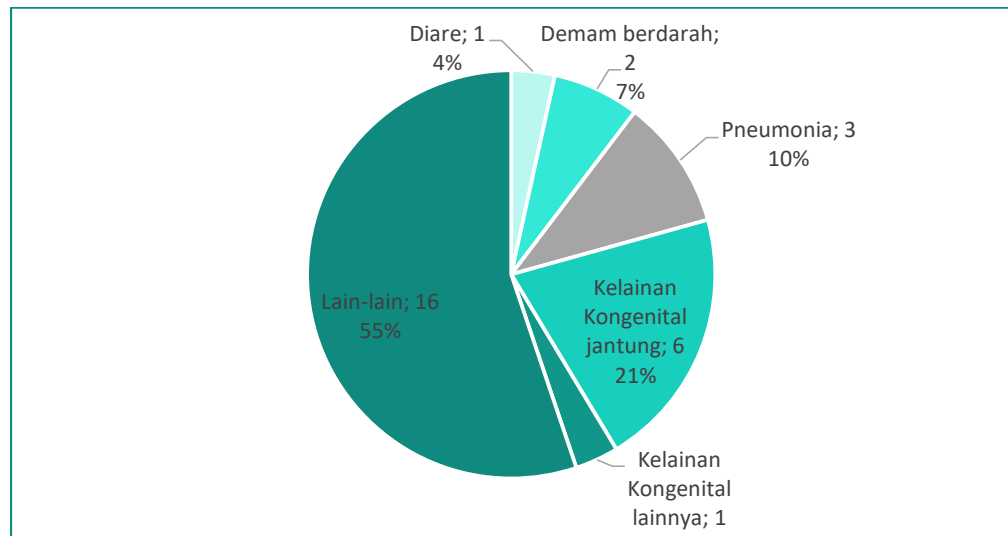
Grafik 2. 5 Tren Angka Kematian Balita (AKBA) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Sumber: Kesga Gizi Dinkes Kab. Purbalingga, 2024

Kematian balita tertinggi terdapat di wilayah kerja Puskesmas Padamara dengan jumlah kasus sebanyak 16 kasus, sedangkan terendah di Puskesmas Bojong dengan jumlah kasus sebanyak 1 kasus. Proporsi penyebab kematian balita (12-59 bulan) dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2. 6 Penyebab Kematian Balita (12-59 bulan) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024



Sumber: Kesga Gizi Dinkes Kab. Purbalingga, 2024

e. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah alat ukur yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menilai tingkat kesehatan dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. IKS mencakup berbagai aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan dalam keluarga, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.

IKS dihitung berdasarkan 12 indikator utama yang mencerminkan kondisi kesehatan dan kesejahteraan keluarga, yaitu:

- Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)
- Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
- Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
- Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
- Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
- Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
- Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
- Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
- Anggota keluarga tidak ada yang merokok
- Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- Keluarga mempunyai akses sarana air bersih

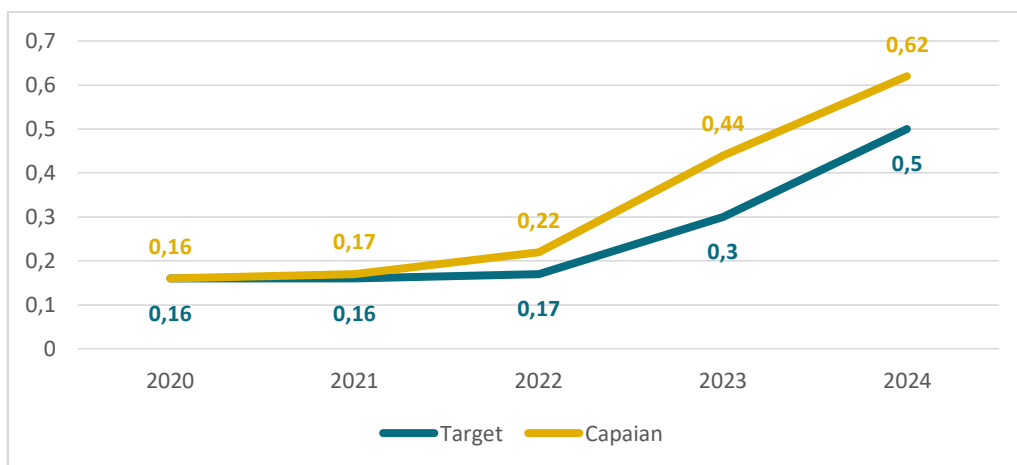
Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Perhitungan IKS dilakukan dengan membagi jumlah indikator yang terpenuhi oleh keluarga dengan total indikator yang relevan, menghasilkan skor antara 0 sampai 1. Kategori berdasarkan nilai IKS adalah:

- a. Keluarga Sehat: IKS > 0,80
- b. Keluarga Pra Sehat: IKS 0,50 – 0,80
- c. Keluarga Tidak Sehat: IKS < 0,50

IKS digunakan untuk mengukur capaian program kesehatan keluarga dan sebagai dasar intervensi untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dalam aspek kesehatan dan lingkungan. Program ini juga terkait dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mengatasi penyakit menular dan tidak menular, serta mengurangi prevalensi stunting.

Indeks Keluarga Sehat adalah ukuran komprehensif yang menilai sejauh mana sebuah keluarga memenuhi standar kesehatan dan kesejahteraan berdasarkan 12 indikator utama, sehingga menjadi alat penting dalam pengembangan program kesehatan masyarakat di Indonesia.

Grafik 2. 7 Tren Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Sumber: Yankes Dinkes Kab. Purbalingga, 2024

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

a. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit

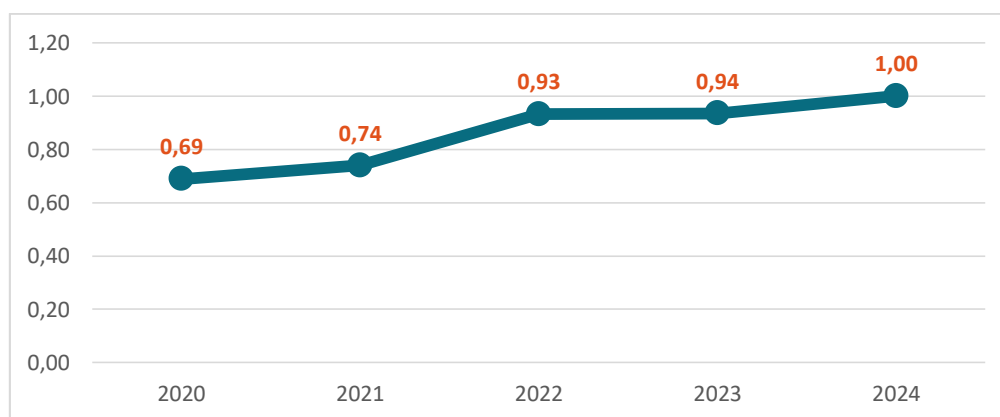
Rasio daya tampung rumah sakit menggambarkan ketersediaan tempat tidur atau fasilitas rawat inap dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana kapasitas pelayanan rumah sakit mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi rasio, semakin besar pula potensi akses masyarakat terhadap layanan rawat inap, sedangkan rasio yang rendah menunjukkan keterbatasan daya tampung yang dapat berdampak pada kualitas pelayanan, keterlambatan penanganan, maupun rujukan ke daerah lain.

Menurut standar Kementerian Kesehatan dan rekomendasi WHO, kebutuhan ideal tempat tidur rumah sakit adalah 1–1,5 tempat tidur per 1.000 penduduk. Dengan menggunakan tolok ukur tersebut, pemerintah daerah dapat memetakan kesenjangan antara jumlah ketersediaan tempat tidur dengan kebutuhan riil masyarakat.

Berdasarkan data rekapitulasi jumlah ketersediaan tempat tidur rumah sakit di Kabupaten Purbalingga dibandingkan per 1000 penduduk menunjukkan kenaikan tiap tahunnya. Tercatat rasio daya tampung di akhir tahun 2024 sebesar 1,00 capaian ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berikut ini capaian rasio daya tampung rumah sakit dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2. 8 Rasio daya Tampung Rumah Sakit Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Sumber: Yankes Dinkes Kab. Purbalingga, 2024

b. Persentase Rumah Sakit Rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi

Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi merupakan indikator mutu pelayanan yang menggambarkan sejauh mana rumah sakit di wilayah tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Akreditasi menjadi tolok ukur penting dalam menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta kepastian tata kelola rumah sakit yang baik. Di Kabupaten Purbalingga, capaian akreditasi rumah sakit rujukan menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Semakin tinggi persentase rumah sakit yang terakreditasi, semakin besar pula jaminan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai standar. Sebaliknya, apabila persentase masih rendah, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mendorong rumah sakit melaksanakan proses akreditasi melalui pembinaan, pendampingan, serta pemenuhan sarana dan prasarana. Dengan meningkatnya jumlah rumah sakit terakreditasi, diharapkan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Purbalingga semakin merata dan berkesinambungan.

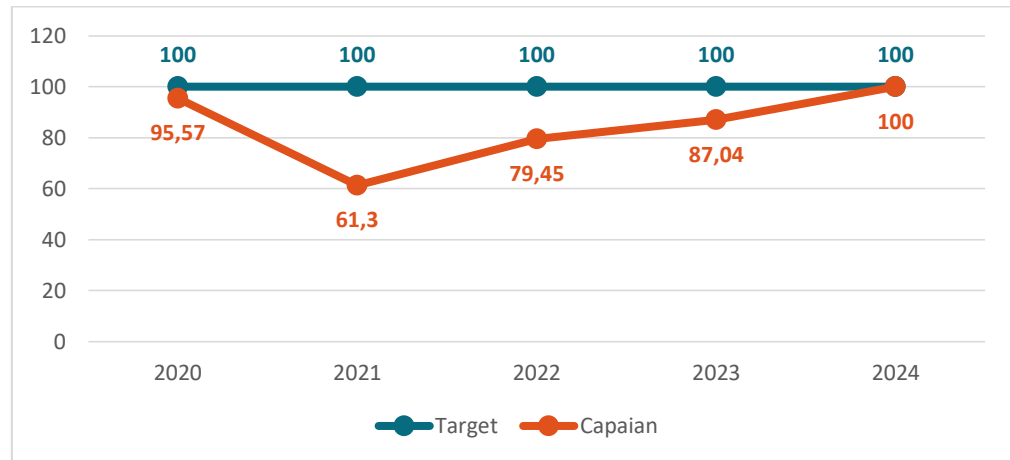
Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yaitu 100%. Hasil akreditasi tersebut dapatkan 8 Rumah Sakit dengan strata Paripurna, 1 Rumah Sakit dengan strata Utama.

c. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di Kabupaten Purbalingga cenderung fluktuatif . terdapat capaian pada tahun 2024 sebesar 100% tercatat adanya kenaikan capaian dari tahun sebelumnya yaitu capaian di tahun 2023 sebesar 87,04%. Berikut ini capaian Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2. 9 Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



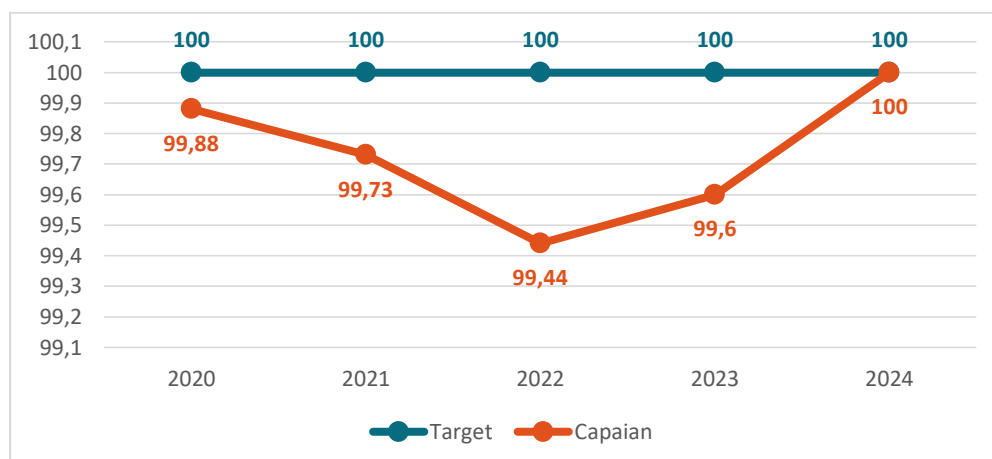
Sumber: Kesga Gizi Dinkes Kab. Purbalingga, 2024

d. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah indikator yang menggambarkan persentase ibu melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter, bidan, atau tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi) di fasilitas pelayanan kesehatan atau dengan prosedur sesuai standar.

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di Kabupaten Purbalingga cenderung fluktuatif. Terdapat capaian pada tahun 2024 sebesar 100% tercatat adanya kenaikan capaian dari tahun sebelumnya yaitu capaian di tahun 2023 sebesar 99,6%. Berikut ini capaian Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2. 10 Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



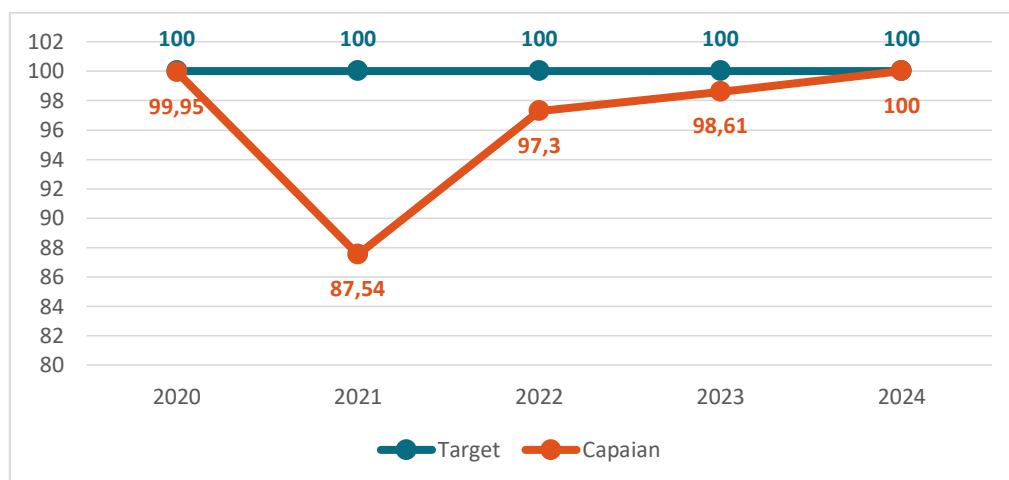
Sumber: Data Kesga Gizi Dinkes Kab Purbalingga, 2024

e. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar dengan kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal dengan ketentuan: Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6-48 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6jam) dan Pelayanan Neonatal setelah lahir (6 jam-28 hari). Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam hal ini wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Purbalingga cenderung naik turun. Capaian di tahun 2024 sebesar 100%, hal ini menunjukkan peningkatan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian sebesar 98,61%. Berikut ini capaian bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2. 11 Capaian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



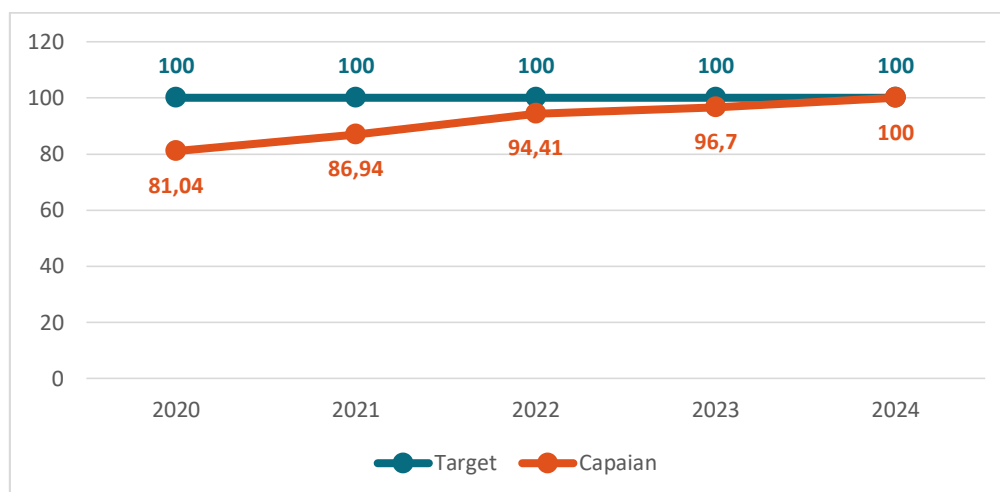
Sumber: Kesga Gizi Dinkes Kab Purbalingga, 2024

f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi: Pelayanan kesehatan balita sehat dan Pelayanan kesehatan balita sakit, Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan anak di usia bayi 0-11 bulan, anak batuta 12-23 bulan dan anak balita 24-59 bulan. Sedangkan pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS). Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Purbalingga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, capaian pelayanan kesehatan balita sebesar 81,04%, kemudian meningkat menjadi 86,94% pada tahun 2021, 94,41% pada tahun 2022, dan 96,7% pada tahun 2023. Peningkatan yang konsisten ini menunjukkan komitmen dan efektivitas program kesehatan balita yang diimplementasikan di Kabupaten Purbalingga.

Grafik 2. 12 Capaian Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Sumber: Kesga Gizi Dinkes Kab Purbalingga, 2024

g. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

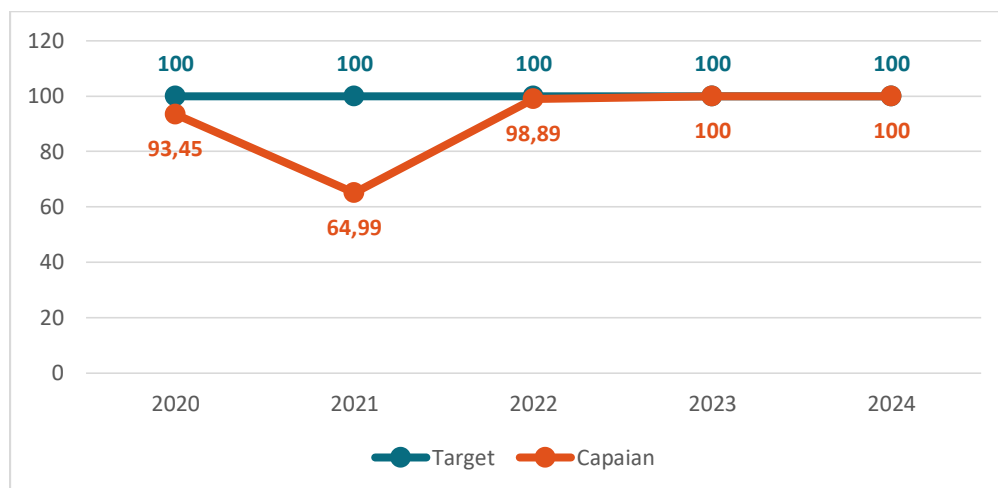
Pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2024. Pelayanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan berkala, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, pemberian imunisasi lanjutan, edukasi kesehatan, serta penanganan dan rujukan bila ditemukan masalah kesehatan.

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kabupaten Purbalingga menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar mencapai 93,45%, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 64,99%. Penurunan drastis ini sangat mungkin disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan penutupan sekolah dan terbatasnya program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pemeriksaan kesehatan di sekolah.

Setelah mengalami penurunan pada tahun 2021, capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar menunjukkan pemulihan yang sangat baik, dengan peningkatan signifikan menjadi 98,89% pada tahun 2022 dan mencapai 100% pada tahun 2023. Pencapaian 100% pada tahun 2024

menunjukkan keberhasilan program kesehatan sekolah di Kabupaten Purbalingga, termasuk pemeriksaan kesehatan berkala, penjangkaran kesehatan siswa, dan program UKS yang berjalan dengan baik.

Grafik 2. 13 Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Sumber: Promkes Dinkes Kab Purbalingga, 2024

h. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

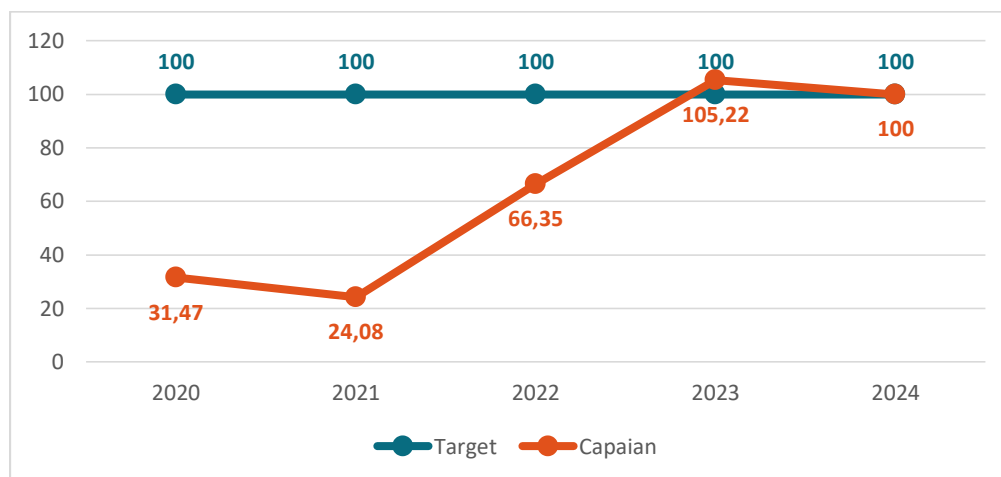
Pelayanan kesehatan sesuai standar untuk kelompok usia produktif adalah skrining kesehatan yang mencakup pemeriksaan dan layanan terkait penyakit menular, tidak menular, dan kesehatan reproduksi, termasuk calon pengantin.

Capaian pelayanan usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dikabupaten Purbalingga cenderung naik turun. Capaian di tahun 2024 sebesar 100%. Terjadi penurunan capaian yang drastis di tahun 2021 dikarenakan masih dalam pandemic COVID-19. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan dramatis ini mungkin termasuk penguatan program kesehatan kerja, pembentukan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM di tempat kerja dan komunitas, program skrining kesehatan massal, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Untuk mempertahankan capaian ini pada tahun 2024,

diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta keberlanjutan program-program inovatif yang telah terbukti efektif.

Berikut ini capaian usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2. 14 Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Sumber: P2PTM Keswa Dinkes Kab Purbalingga, 2024

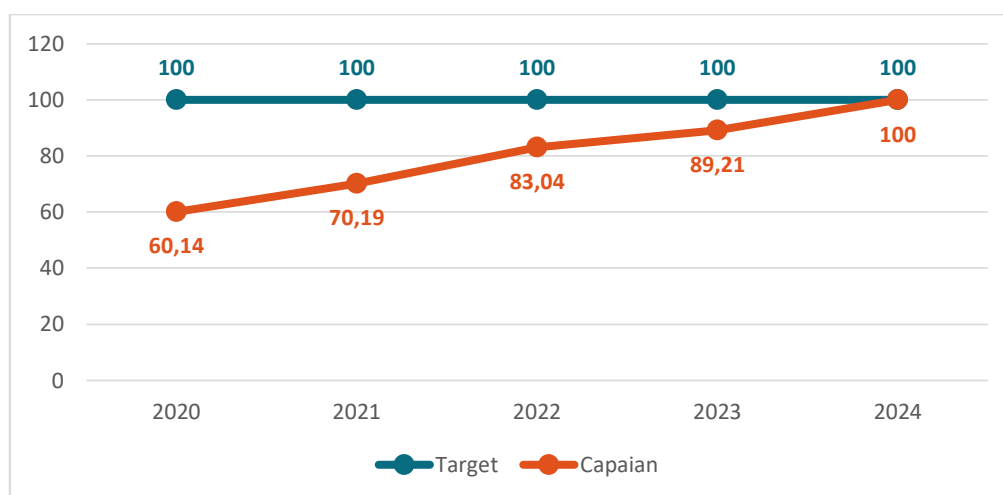
i. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk warga usia 60 tahun ke atas sesuai standar yang meliputi; pelayanan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat pada usia lanjut; pelayanan skrining faktor risiko pada usia lanjut minimal 1 kali dalam setahun; dan tindaklanjut hasil skrining faktor risiko pada usia lanjut. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam hal ini wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut ini dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan serta kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu.

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Purbalingga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 60,14%, kemudian meningkat menjadi 70,19% pada tahun 2021, 83,04%

pada tahun 2022, dan 89,21% pada tahun 2023. Peningkatan yang konsisten ini menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap kesehatan lansia di Kabupaten Purbalingga. Capaian di tahun 2024 sebesar 100%.

Grafik 2. 15 Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Sumber: Kesga Gizi Dinkes Kab Purbalingga, 2024

j. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

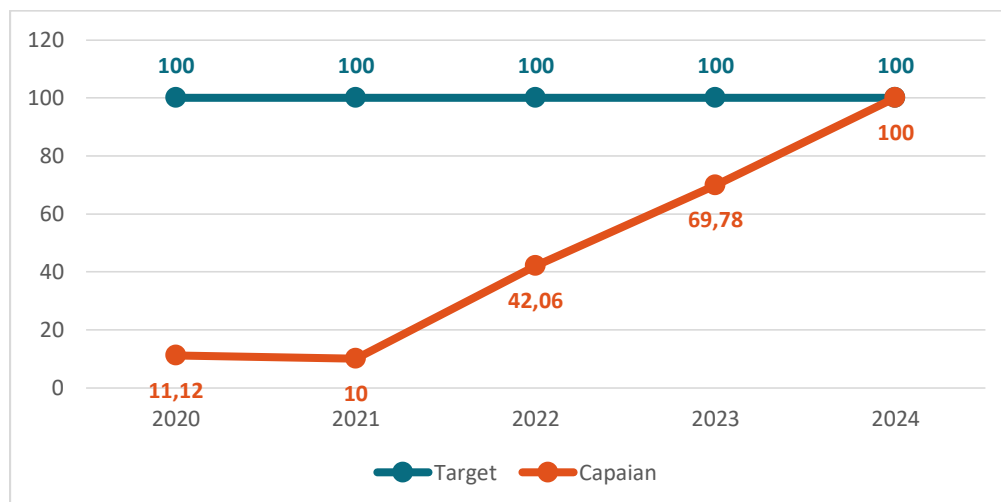
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada warga penderita hipertensi sesuai standar yang meliputi; Pengukuran tekanan darah (dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes); Pelayanan edukasi dan konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi; dan Melakukan rujukan jika diperlukan (penderita hipertensi dengan komplikasi). Pelayanan kesehatan hipertensi ini dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ini wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi di Kabupaten Purbalingga menunjukkan tren yang sangat menarik. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi sangat rendah, masing-masing hanya 11,12% dan 10,00%. Rendahnya capaian ini menunjukkan adanya

kesenjangan yang besar dalam deteksi dan penanganan kasus hipertensi di masyarakat. Namun, terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2022, di mana capaian meningkat menjadi 42,06%, dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 69,78%.

Peningkatan dramatis dalam capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi pada periode 2021-2023 menunjukkan keberhasilan program-program pengendalian penyakit tidak menular yang diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Program-program seperti Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM, skrining hipertensi di komunitas, dan edukasi masyarakat tentang faktor risiko hipertensi telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan capaian. Capaian Pelayanan kesehatan penderita hipertensi di Kabupaten Purbalingga di tahun 2024 sebesar 100% hal ini menunjukkan adanya peningkatan capaian dari tahun ke tahun.

Grafik 2. 16 Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi usia Standar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Sumber: P2PTM Keswa Dinkes Kab Purbalingga, 2024

k. Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

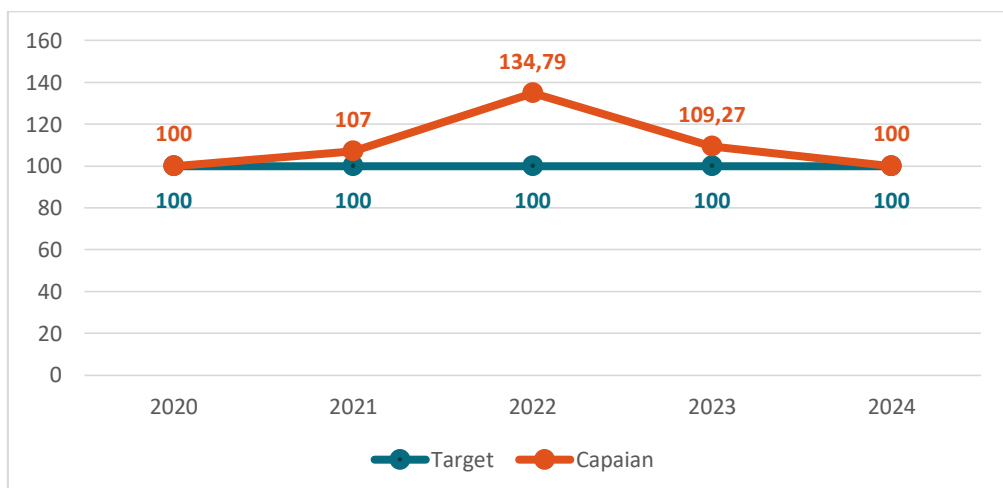
Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di Kabupaten Purbalingga menunjukkan capaian yang sangat baik, bahkan melebihi target 100% selama periode 2020-2023. Pada tahun 2020, capaian pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus telah mencapai 100%, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 107% pada tahun 2021 dan 134,79% pada tahun 2022. Meskipun sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 109,27%, capaian ini tetap berada jauh di atas target 100%.

Keberhasilan dalam pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di Kabupaten Purbalingga dapat menjadi model bagi kabupaten/kota lain dalam pengendalian penyakit tidak menular. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan ini antara lain implementasi Posbindu PTM yang efektif, kolaborasi dengan organisasi profesi dan masyarakat, serta pendekatan terintegrasi dalam pengendalian faktor risiko diabetes melitus.

Untuk mempertahankan capaian yang baik ini pada tahun 2024, diperlukan penguatan pada aspek kualitas pelayanan, termasuk manajemen kasus diabetes yang komprehensif, pengendalian komplikasi, dan dukungan untuk perubahan gaya hidup yang berkelanjutan bagi penderita diabetes melitus.

Grafik 2. 17 Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



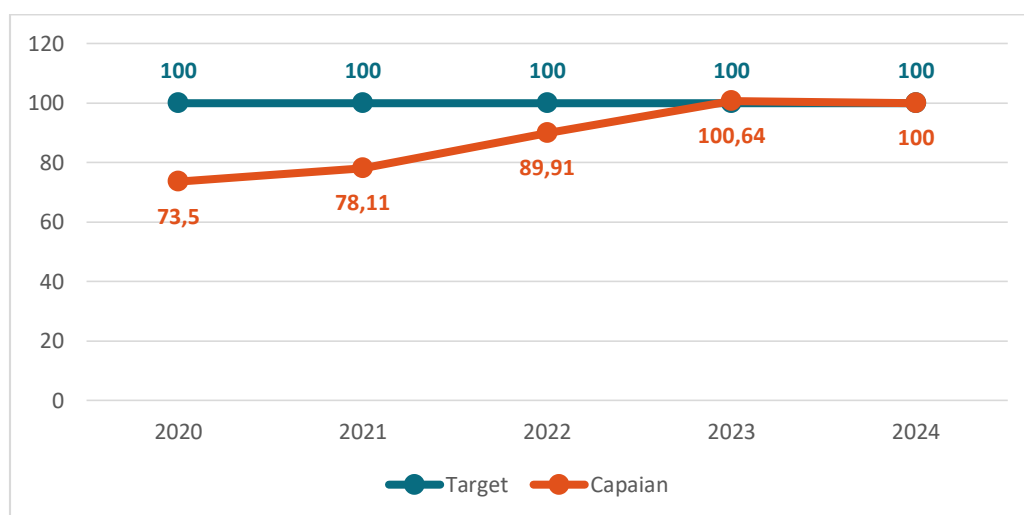
Sumber: P2PTM Keswa Dinkes Kab Purbalingga, 2024

I. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia yang meliputi: Pemeriksaan kesehatan jiwa (pemeriksaan status mental dan wawancara); Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluarga *caregiver*; Melakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi; dan Tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat. Pelayanan kesehatan Penderita ODGJ Berat dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih), tenaga profesional lainnya dan tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.

Capaian ODGJ berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari tahun 2020 dengan capaian 73,50% hingga di tahun 2024 dengan capaian sebesar 100%. Berikut ini capaian ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2. 18 Capaian Pelayanan Kesehatan pada ODGJ Berat Sesuai Standar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Sumber: P2PTM Keswa Dinkes Kab Purbalingga, 2024

m. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

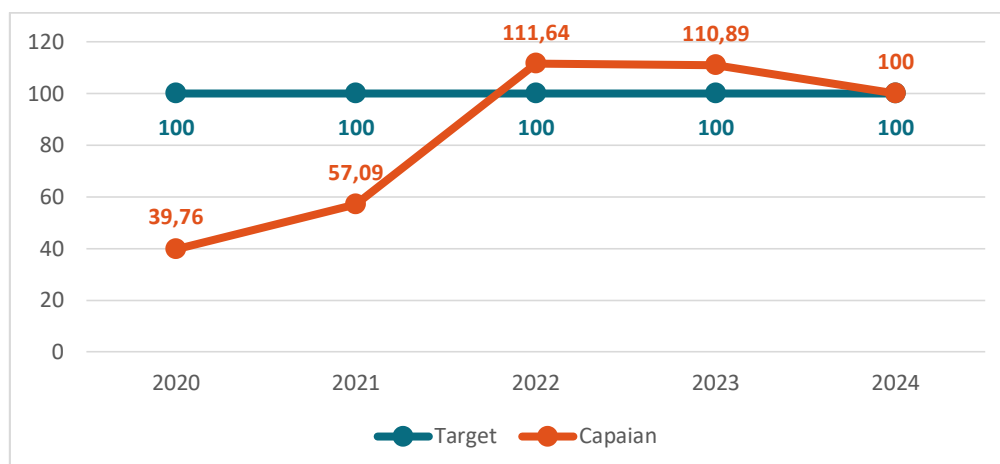
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang terduga TBC sesuai standar meliputi: Pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda; Pemeriksaan penunjang terduga TBC (menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM), mikroskopis atau radiologis sesuai pedoman atau standar operasional prosedur yang berlaku); Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan; dan Melakukan rujukan jika diperlukan. Pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Kabupaten Purbalingga dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya. Capaian dari tahun 2020 sebesar 39,76% mengalami kenaikan hingga di tahun 2024 dengan capaian sebesar 100%.

Keberhasilan dalam pelayanan kesehatan orang terduga TB ini tidak lepas dari implementasi strategi End TB yang menekankan pada penemuan kasus secara aktif di masyarakat, penguatan kapasitas laboratorium untuk diagnosis TB, dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penemuan kasus TB. Program-program seperti TB-HIV kolaborasi, *public-private mix* dalam pengendalian TB, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang gejala TB juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan capaian.

Berikut tren Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Kabupaten Purbalingga dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Grafik 2. 19 Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC Sesuai Standar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Sumber: P2PM Dinkes Kab Purbalingga, 2024

n. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar yang meliputi: Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan; Skrining dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun; dan Melakukan rujukan jika diperlukan. Pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan serta tenag non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu sebagai pendamping/ penjangkauan.

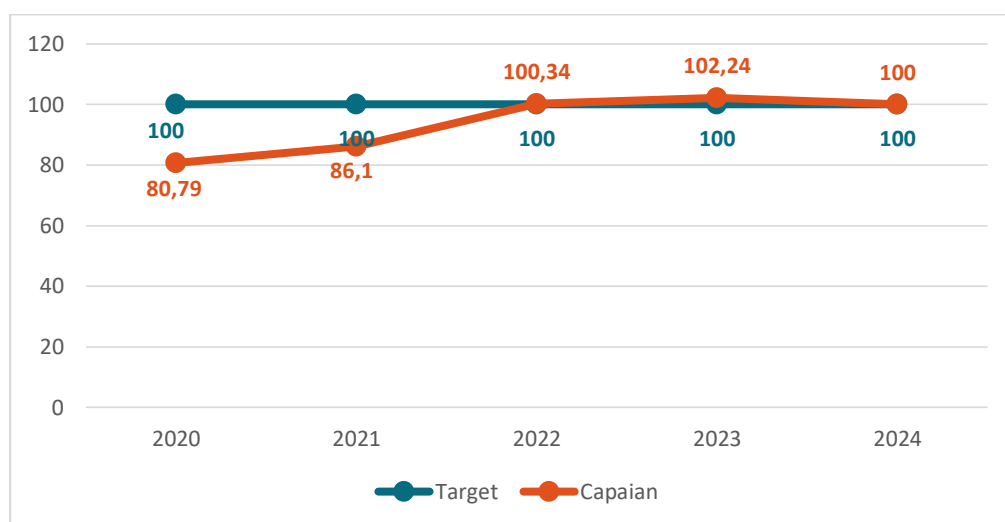
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar di Kabupaten Purbalingga dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan setiap tahunnya. Di tahun 2020 dengan capaian sebesar 80,79% mengalami peningkatan hingga di tahun 2024 dengan capaian sebesar 100%.

Keberhasilan dalam pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV tidak lepas dari implementasi strategi nasional penanggulangan HIV-AIDS yang menekankan pada prinsip SUFA (*Strategic Use of ARV*), yaitu tes HIV sedini mungkin, pengobatan ARV sedini mungkin, dan pemantauan kepatuhan pengobatan. Program-program seperti PMTS (Pencegahan Melalui Transmisi Seksual), PMTCT (*Prevention of Mother to Child Transmission*), dan *Harm*

Reduction untuk pengguna NAPZA suntik juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan capaian.

Berikut capaian Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar di Kabupaten Purbalingga dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2. 20 Capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko HIV Sesuai Standar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Sumber: P2PM Dinkes Kab Purbalingga, 2024

o. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

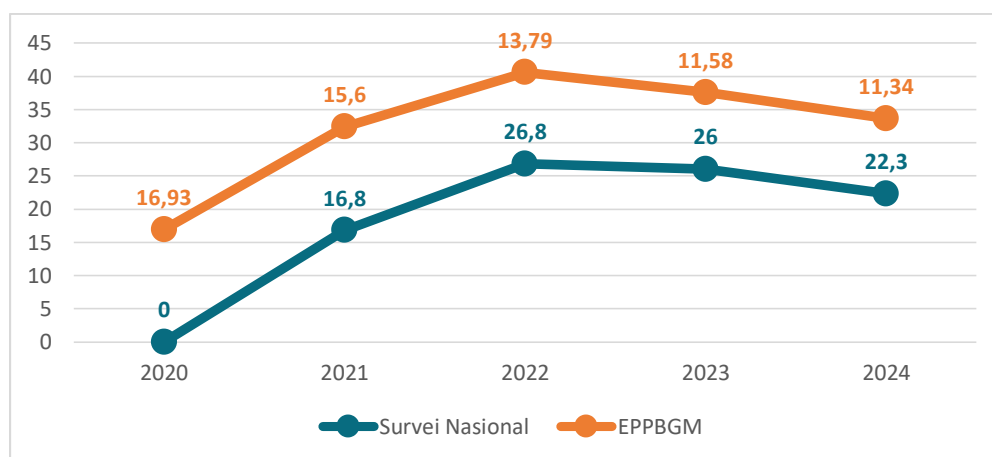
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam waktu lama, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (masa kehamilan hingga usia dua tahun). Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan standar usianya, yang menunjukkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat asupan gizi yang tidak memadai.

Penanganan stunting dilakukan secara holistik dan integratif dengan melibatkan berbagai sektor, termasuk program pemberian makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, bayi, dan balita, serta edukasi keluarga tentang pemenuhan gizi dan pola asuh yang baik. Pemerintah juga menggalakkan gerakan pendampingan keluarga untuk memastikan kebutuhan gizi anak

terpenuhi. Penurunan stunting menjadi prioritas nasional karena dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada perkembangan kognitif, kesehatan jangka panjang, dan produktivitas masa depan anak-anak.

Angka prevalensi stunting di Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan dari 11,58% pada tahun 2023 menjadi 11,34% pada tahun 2024 berdasarkan data Elektronik Pelaporan dan Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM). Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia / Survei Kesehatan Indonesia terjadi tren kenaikan dari 16,8 persen pada tahun 2021 menjadi 26,8 persen pada tahun 2022 meskipun kembali turun menjadi 22,3 pada tahun 2024.

Grafik 2. 21 Prevalensi Stunting di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024



Sumber: Kesga Gizi Dinkes Kab Purbalingga, 2024

Penanganan stunting di Purbalingga dilakukan secara holistik dan bersamaan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, termasuk intervensi di bidang perbaikan rumah tidak layak huni, sanitasi, dan akses air bersih. Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan anggaran sekitar Rp 81,5 miliar untuk intervensi spesifik yang meliputi screening kesehatan remaja putri, calon pengantin, ibu hamil dan bayi/balita, pemberian makanan tambahan, penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), jambanisasi, serta penggerakan kader kesehatan.

Meski data ePPGBM menunjukkan angka stunting sekitar 11,34%, survei lain seperti Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat prevalensi stunting di Purbalingga lebih tinggi, yaitu sebesar 26% pada 2024, sehingga menjadi tantangan dalam pengumpulan dan pemanfaatan data yang akurat.

Kabupaten Purbalingga berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 11,34% pada 2024 melalui program intervensi gizi dan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, meskipun tantangan data dan faktor sosial masih perlu diatasi. Pencapaian ini sudah melebihi target nasional sebesar 18% pada akhir 2025.

Tabel 2. 13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	INDIKATOR KINERJA UTAMA															
1	Usia Harapan Hidup	73,3	73,3	73,3	73,3	74	73,14	73,21	73,28	73,98	74,19	99,78	99,88	99,97	100,93	100,26
2	Angka Kematian Ibu(AKI)	64	61	74,32	74,32	67,57	81,04	191,6	99,09	102,44	95,28	78,97	31,84	75,00	72,55	70,92
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	6,5	6,1	7,7	7,64	7,57	7,77	9,72	9,98	14,03	13,25	83,66	62,76	77,15	54,45	57,13
4	Angka Kematian Balita (AKBA)	7,6	7,2	9,19	9,12	9,05	9,25	11,64	12,8	16,63	15,76	82,16	61,86	71,80	54,84	57,42
5	Indeks Keluarga Sehat	0,16	0,16	0,17	0,3	0,5	0,16	0,17	0,22	0,44	0,62	100	106,25	129,41	146,67	124
B	INDIKATOR KINERJA KUNCI															
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	1	1	1	1	1	0,69	0,74	0,93	0,94	1,00	69,00	74,00	93,00	94,00	100,00
2	Persentase Rumah Sakit Rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	100	95,57	61,3	79,45	87,04	100	95,57	61,30	79,45	87,04	100,00
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	100	100	99,88	99,73	99,44	99,6	100	99,88	99,73	99,44	99,60	100,00

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	100	99,95	87,54	97,3	98,61	100	99,95	87,54	97,30	98,61	100,00
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100	100	100	81,04	86,94	94,41	96,7	100	81,04	86,94	94,41	96,70	100,00
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	93,45	64,99	98,89	100	100	93,45	64,99	98,89	100,00	100,00
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	31,47	24,08	66,35	105,22	100	31,47	24,08	66,35	105,22	100,00
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	60,14	70,19	83,04	89,21	100	60,14	70,19	83,04	89,21	100,00
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	11,12	10	42,06	69,78	100	11,12	10,00	42,06	69,78	100,00

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	107	134,79	109,27	100	100,00	107,00	134,79	109,27	100,00
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	100	100	73,5	78,11	89,91	100,64	100	73,50	78,11	89,91	100,64	100,00
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	100	100	39,76	57,09	111,64	110,89	100	39,76	57,09	111,64	110,89	100,00
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100	100	100	80,79	86,1	100,34	102,24	100	80,79	86,10	100,34	102,24	100,00
15	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita			15,6	15	14	16,93	15,6	13,79	11,58	11,34	#DIV/0!	#DIV/0!	89,74	112,87	111,43
C STANDAR PELAYANAN MINIMAL																
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100	100	100	100	95,57	61,3	79,45	87,04	100	95,57	61,3	79,45	87,04	100

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	100	100	100	100	99,88	99,73	99,44	99,6	100	99,88	99,73	99,44	99,6	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	100	100	100	100	99,95	87,54	97,3	98,61	100	99,95	87,54	97,3	98,61	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	100	100	100	100	81,04	86,94	94,41	96,7	100	81,04	86,94	94,41	96,7	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	93,45	64,99	98,89	100	100	93,45	64,99	98,89	100	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100	100	100	100	100	31,47	24,08	66,35	105,22	100	31,47	24,08	66,35	105,22	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100	100	100	100	100	60,14	70,19	83,04	89,21	100	60,14	70,19	83,04	89,21	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	100	100	100	100	11,12	10	42,06	69,78	100	11,12	10	42,06	69,78	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	100	100	100	100	100	107	134,79	109,27	100	100	107	134,79	109,27	100
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	100	100	100	100	100	73,5	78,11	89,91	100,64	100	73,5	78,11	89,91	100,64	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100	100	100	100	39,76	57,09	111,64	110,89	100	39,76	57,09	111,64	110,89	100
12	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV	100	100	100	100	100	80,79	86,1	100,34	102,24	100	80,79	86,1	100,34	102,24	100

Secara umum, capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada periode tahun 2020-2024 menunjukkan tren positif, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan percepatan dan intervensi khusus.

Berdasarkan data evaluasi tahun 2024, dari Indiktor Kinerja Utama terdapat beberapa indikator belum mencapai target diantaranya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA). Walaupun dari tahun ke tahun jumlah kasus kematian terdapat penurunan namun capaian kinerja masih dibawah target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan strategi percepatan penurunan kematian ibu dan anak melalui: peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak; peningkatan kompetensi dan distribusi tenaga kesehatan; peningkatan sistem rujukan maternal; deteksi dini dan pencegahan penyakit infeksi; serta peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Capaian Indeks Kinerja Kunci bidang kesehatan dan capaian kinerja SPM bidang kesehatan berdasarkan data evaluasi tahun 2024 semuanya telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini dicapai melalui kebijakan yang kuat dan komitmen Pemerintah Daerah; ketersediaan sarana dan prasarana, optimalisasi sumber daya manusia kesehatan.

Sementara itu untuk mengetahui penilaian capaian kinerja anggaran selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja anggaran dengan membandingkan antara pagu/ target anggaran dan realisasi anggaran. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisis tingkat capaian dari realisasi anggaran dari masing-masing capaian program. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas, untuk menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan fungsinya dalam penyediaan dan memberikan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Untuk melaksanakan program guna mencapai tujuan dan sasaran tahun 2021-2024. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga mendapatkan total anggaran belanja selama 4 tahun sebesar Rp. 2.003.563.004.711.-. sedangkan total realisasi belanja tahun 2021-2024 sebesar Rp. 1.717.580.027.119.-. Persentase rata-rata capaian kinerja anggaran belanja langsung tahun 2021-2024 adalah sebesar 85,73%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran berdasarkan belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga

Uraian	Anggaran Tahun				Realisasi Anggaran Tahun				Rasio antara Realisasi dengan Anggaran			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BELANJA DAERAH	168.432.577.930	160.807.964.000	174.335.588.000	161.977.758.000	156.570.023.374	147.795.477.823	146.255.707.608	157.309.628.250	92,96	91,91	83,89	97,12
Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	89.356.157.500	100.227.203.000	115.400.931.000	112.817.642.000	87.346.794.080	94.273.184.404	95.411.909.886	109.064.814.700	97,75	94,06	82,68	96,67
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	77.740.025.430	59.469.753.000	55.410.371.000	45.492.720.000	68.334.691.994	52.529.065.999	47.503.264.022	44.650.722.760	87,90	88,33	85,73	98,15
Program Peningkatan kapasitas SDM	422.957.000	229.907.000	969.847.000	1.409.950.000	270.845.100	221.021.330	908.487.900	1.407.313.810	64,04	96,14	93,67	99,81
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan, Minuman	199.291.000	267.502.000	513.376.000	465.344.000	82.441.500	192.663.090	420.696.200	403.839.100	41,37	72,02	81,95	86,78
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	714.147.000	613.599.000	2.041.063.000	1.792.102.000	535.250.700	579.543.000	2.011.349.600	1.782.937.880	74,95	94,45	98,54	99,49

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

2.1.3.2 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan program di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan peserta KB aktif MKJP pada tahun 2024. Jumlah peserta KB MKJP sebesar 41.275 Akseptor. Jumlah peserta KB aktif 2024 sebesar 73.415.

Program-program yang dilaksanakan untuk menyukseskan kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu:

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana
 - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB/PLKB;
 - c. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
2. Program Pengendalian Penduduk
 - a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota.
3. Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera;
 - a. Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat daerah kabupaten/kota dalam Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Tabel 2.15 Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Rata-rata Angka Kelahiran Total / TFR	2,24	2,35	2,25	2,15	2,05	1,96	1,96	1,99	2,25	2,05	80,9	83,4	88,4	104,6	100

Tabel 2.16 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga

Uraian	Anggaran Tahun				Realisasi Anggaran Tahun				Rasio antara Realisasi dengan Anggaran			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BELANJA DAERAH												
Program Pengendalian Penduduk	89.250.000	311.505.000	402.744.000	440.919.000	88.494.000	295.743.150	376.919.284	368.658.850	99,15	94,94	93,59	83,61
Program Pemberdayaan Keluarga Berencana	7.059.717.100	6.185.563.000	6.919.858.000	7.482.904.000	6.409.881.319	5.865.089.788	6.589.531.606	5.823.034.092	90,80	94,82	95,23	77,82

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Indikator Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) berdasarkan capaian kinerja selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 dan 2024 capaian kinerja mencapai target yang sudah ditetapkan.

Banyak hal yang mempengaruhi meningkatnya Angka Kelahiran Total / TFR yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi dan tingkat urbanisasi. Tingkat pendapatan dapat diwakili oleh pendapatan perkapita. Keterkaitan pada pendapatan terhadap fertilitas adalah ketika pendapatan seseorang naik akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi.

Permasalahan Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain pengetahuan penduduk usia remaja tentang penundaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah, masih banyaknya PUS tidak ingin anak, tidak KB tetapi tidak hamil, peningkatan MKJP dengan metode kontrasepsi timol terhambat dan masih rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga, hal ini sering terjadi dikarenakan masih banyak terjadi pernikahan dini, tingkat partisipasi pendidikan masyarakat masih rendah, banyak PUS suaminya bekerja di luar daerah, tenaga medis yang terlatih tidak bisa melayani karena menjadi pejabat struktural, Hanya sampai di kegiatan sosialisasi dan pelatihan saja, belum ada bantuan langsung, Sehingga untuk mendorong keberhasilan meningkatnya kepesertaan dan partisipasi keluarga berencana perlu berkomitmen dan dukungan pemerintah, toga dan toma, adanya sarpras pendidikan yang memadai, Dukungan LSM kepemudaan, Pengetahuan PUS untuk berKB tinggi, keinginan PUS untuk tidak ingin punya anak lagi, Animo akseptor MOW metode timol tinggi serta Menambah anggaran daerah guna memberikan bantuan langsung.

Faktor Pendorong Keberhasilan Indikator Kinerja Sasaran:

1. Melaksanakan Pendataan Keluarga guna mengetahui kondisi tingkat kesejahteraan keluarga yang sebenarnya;
2. Melaksanakan pengembangan cakupan dan kualitas kelompok UPPKS guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam peningkatan ekonomi produktif. Pelaksanaan pelatihan dalam mengelola produk UPPKS dan dibuka pameran produk UPPKS guna sarana promosi produk UPPKS;

3. Membentuk kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak dan remaja dan juga meningkatkan kualitas keluarga lanjut usia;
4. Penyampaian advokasi melalui siaran Iklan dan Podcast di radio;
5. Metode penyampaian pesan melalui media radio juga dilakukan, tetapi metode ini kurang efektif karena hanya berupa pesan searah sehingga kurang mendapat tanggapan pendengar radio;
6. Pembentukan kelompok Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK - R). Kelompok ini berfungsi untuk sarana sosialisasi dan konseling bagi remaja dalam meningkatkan pengetahuan reproduksi remaja. Karena dengan meningkatkan pengetahuan reproduksi remaja dapat mencegah atau mengurangi angka pernikahan dini yang terjadi. Karena tingkat kematangan usia perkawinan berpengaruh pada kualitas keluarga. Kelompok ini juga melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Generasi Berencana (GenRe) di sekolah – sekolah yang tujuannya untuk memotivasi siswa siswi lebih merencanakan masa depannya;
7. Program Kampung KB yang sarannya adalah Rukun Warga tertinggal / ranking class nya lebih rendah dari Rukun Warga lainnya di 18 Kecamatan Kabupaten Purbalingga. Untuk tahun 2018 sudah dicanangkan 36 Kampung KB untuk seluruh Kabupaten Purbalingga. 36 Kampung KB yang sudah dicanangkan sebagai berikut:
 - a. Kampung KB Kecamatan Bukateja, Desa Bajong Rw. 05;
 - b. Kampung KB Kecamatan Bobotsari, Desa Talagening Rw. 11;
 - c. Kampung KB Kecamatan Bojongsari, Desa Bumisari Rw. 12;
 - d. Kampung KB Kecamatan Kemangkon, Desa Jetis Rw. 03;
 - e. Kampung KB Kecamatan Bukateja, Desa Wirasaba Rw. 04;
 - f. Kampung KB Kecamatan Kejobong, Desa Langgar Rw. 01;
 - g. Kampung KB Kecamatan Kaligondang, Desa Brecek Rw. 04;
 - h. Kampung KB Kecamatan Purbalingga, Desa Toyareja Rw. 01;
 - i. Kampung KB Kecamatan Kalimanah, Desa Karang Sari Rw. 05;
 - j. Kampung KB Kecamatan Kutasari, Desa Karangcegak Rw. 01;
 - k. Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Karangangka Rw. 02;
 - l. Kampung KB Kecamatan Bobotsari, Desa Palumbungan Rw. 02;
 - m. Kampung KB Kecamatan Karangreja, Desa Gondang Rw. 01;
 - n. Kampung KB Kecamatan Karanganyar, Desa Brakas Rw. 02;

- o. Kampung KB Kecamatan Karangmoncol, Desa Baleraksa Rw. 09;
- p. Kampung KB Kecamatan Rembang, Desa Bantarbarang Rw. 08;
- q. Kampung KB Kecamatan Bojongsari, Desa Pekalongan Rw. 04;
- r. Kampung KB Kecamatan Padamara, Desa Mipiran Rw. 01;
- s. Kampung KB Kecamatan Pengadegan, Desa Pasunggingan Rw. 01;
- t. Kampung KB Kecamatan Karangjambu, Desa Sirandu Rw. 04;
- u. Kampung KB Kecamatan Kertanegara, Desa Kasih Rw. 01;
- v. Kampung KB Kecamatan kertanegara, Desa Langkap Rw 03 dengan keterangan desa tertinggal;
- w. Kampung KB Kecamatan Bukateja, Desa Karanggedang Rw 02 dengan keterangan desa tertinggal;
- x. Kampung KB Kecamatan Bobotsari, Desa Tlagayasa Rw 07 dengan katerangan desa tertinggal;
- y. Kampung KB kecamatan pengadegan, Desa Pengadegan Rw 05 dengan keterangan desa tertinggal;
- z. Kampung KB Kecamatan Padamara, Desa Kalitinggar kidul Rw 01 dengan keterangan desa Gizi Buruk (Stunting);
- aa. Kampungb KB Kecamatan karangreja, Desa Tlahab Kidul Rw 04 dengan keterangan desa tertinggal;
- bb. Kampung KB Kecamatan Kutasari, Desa Candinata Rw 03 dengan katerangan desa Gizi Buruk (Stunting);
- cc. Kampung KB Kecamatan Kemangkon, Desa plumutan Rw 05 dengan keterangan Gizi Buruk (Stunting);
- dd. Kampung KB Kecamatan Kaligondang, Desa Sempor Lor Rw 02 dengan kategori desa keterangan Gizi Buruk (Stunting);
- ee. Kampung KB Kecamatan Kaligondang, Desa Cilapar Rw 02 dengan kategori desa keterangan Gizi Buruk (Stunting);
- ff. Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Selaganggeng Rw 01 dengan kategori desa Gizi Buruk (Stunting);
- gg. Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Keradenan Rw 03 dengan kategori desa Gizi Buruk (Stunting);
- hh. Kampung KB Kacamatan Mrebet, Desa Sangkanayu Rw 05 dengan kategori desa Gizi Buruk (Stunting);
- ii. Kampung KB Kecamatan Karangmoncol, Desa Sirau Rw 04 dengan kategori desa tertinggal;

- jj. Kampung KB kecamatan Karangjambu, Desa Jingsang Rw 02 dengan keterangan desa tertinggal.

Faktor Penghambat Tercapainya Indikator Kinerja Sasaran:

1. Pengetahuan petugas/ kader pendata masih belum memahami secara detail indikator data yang diharapkan;
2. Periode pendataan relatif pendek dan menjelang akhir tahun periode.
3. Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam peningkatan ekonomi produktif,
4. Produktifitas Ekonomi Perempuan di Kabupaten Purbalingga masih minim.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup berbagai lapisan masyarakat yang menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sehat dan keluarga berkualitas. Secara umum, kelompok sasaran tersebut meliputi:

1. Masyarakat Umum

Masyarakat umum sebagai penerima langsung layanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

2. Kelompok Umur Khusus

Kelompok umur khusus seperti bayi dan balita (0-5 tahun), anak usia pendidikan dasar, remaja, orang dewasa (15-59 tahun), dan lansia (60 tahun ke atas) yang menjadi sasaran skrining kesehatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar

3. Kelompok dengan kondisi kesehatan khusus

Kelompok dengan kondisi kesehatan khusus seperti penderita hipertensi, tuberkulosis, gangguan jiwa, dan penyakit menular maupun tidak menular lainnya yang mendapat pengobatan dan pemantauan

4. Petugas kesehatan, pengelola program, dan lintas sektor

Petugas kesehatan, pengelola program, dan lintas sektor yang terlibat dalam pelaksanaan program kesehatan sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan dan pencegahan penyakit

5. Keluarga dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program kesehatan berbasis Keluarga dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program kesehatan berbasis masyarakat, seperti upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM), serta program-program perbaikan gizi dan pencegahan stunting
6. Kelompok Rentan dan Marginal
Masyarakat miskin (jaminan kesehatan BPJS Kesehatan/KIS), penyandang disabilitas, dan kelompok terpencil.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Mitra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah berbagai pihak yang menjalin kerjasama untuk mendukung pelaksanaan program dan upaya peningkatan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Mitra ini berasal dari lintas sektor yang meliputi: Pemerintah di berbagai tingkatan dan sektor terkait, Dunia usaha atau sektor swasta, Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan LSM, Institusi pendidikan kesehatan, Kelompok profesional dan masyarakat.

Tabel 2. 17 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

No	Mitra	Peran
1	2	3
1	Kemenkes RI	Membuat kebijakan nasional di bidang kesehatan
2	BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)	Membuat kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga
3	Dinas Kesehatan Provinsi	perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di berbagai aspek kesehatan
4	Bappelitbangda	Perencanaan, penganggaran, sinkronisasi program dan kegiatan bidang kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana agar selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
5	Bakeuda	Pengelolaan anggaran, pembiayaan layanan, serta pengelolaan aset sarana dan prasarana kesehatan.
6	Dinas Pendidikan	Bekerja sama dalam pelaksanaan UKS, edukasi kesehatan reproduksi remaja, gizi anak sekolah, serta pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di satuan pendidikan.
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	Bekerja sama dalam pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan, masyarakat miskin,

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	serta penanganan masalah sosial yang berdampak pada status kesehatan keluarga dan masyarakat. Pembinaan Kampung KB dan pemberdayaan keluarga di tingkat desa
8	DPUPR	Berperan dalam mitra pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan.
9	DLH	Mendukung peningkatan kesehatan lingkungan, permukiman sehat, pengelolaan limbah, dan pengendalian faktor risiko lingkungan.
10	Dinpendukcapil	Menyediakan data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan dan penetapan sasaran pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
11	Dinkominfo	Mendukung diseminasi informasi, edukasi kesehatan
12	Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan LSM	Mendukung komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait kesehatan, pengendalian penduduk, keluarga berencana.
13	Institusi Pendidikan	Seperti sekolah tinggi kesehatan, universitas, dan sekolah menengah kejuruan yang bermitra dengan Dinas Kesehatan untuk kegiatan praktek kerja lapangan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.
14	Kelompok profesional dan masyarakat	Pelaksana program di tingkat komunitas dan mendukung pemberdayaan masyarakat.
15	Fasilitas pelayanan Kesehatan	Berperan langsung dalam layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif: Puskesmas, Rumah Sakit (RSUD maupun swasta), Klinik dan laboratorium, Apotek dan toko obat serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Serta berperan dalam pelayanan keluarga berencana.

2.1.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pemerataan akses, pencapaian target pembangunan kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kerjasama ini dapat berbentuk kerjasama antarkabupaten/kota, dengan pemerintah provinsi, maupun dengan instansi vertikal, serta melibatkan lintas sektor terkait. Bentuk kerjasama meliputi:

Tabel 2. 18 Kerja Sama yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

No	Bidang Kerja Sama	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama
1	2	3	4
1	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Kabupaten/Kota sekitar, RS Provinsi, RS Vertikal Kemenkes	Rujukan pasien rujukan maternal neonatal, kasus kegawatdaruratan, penyakit rujukan tertentu
2	Laboratorium Kesehatan & Diagnostik	Labkesda Provinsi/Kabupaten lain, Balai Besar Laboratorium Kesehatan	Pemanfaatan fasilitas laboratorium untuk pemeriksaan khusus (TBC, HIV, dll.)
3	Pengendalian Penyakit & KLB	Dinas Kesehatan Kabupaten tetangga, Dinas Provinsi, BPBD	Kerja sama surveilans epidemiologi, penanggulangan KLB/wabah lintas batas daerah
4	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) / Stunting	Dinas Pendidikan, Dinsospermasdesp3a, PKK, Desa	Program intervensi gizi spesifik & sensitif, UKS, Posyandu
5	Jaminan Kesehatan	BPJS Kesehatan, RSUD/BLUD antar daerah	Sinkronisasi data peserta, rujukan pelayanan antar wilayah
6	Kesehatan Usia Produktif & Lansia	Dinas Tenaga Kerja, Kemenag, Lembaga Sosial	Skrining kesehatan pekerja, pelayanan kesehatan calon pengantin, layanan lansia
7	Kesehatan Lingkungan & Gizi	Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian, PUPR	Sanitasi, air bersih, keamanan pangan
8	Kesiapsiagaan Bencana	BPBD, PMI, TNI/Polri	Layanan darurat kesehatan saat bencana, SPGDT, sistem rujukan darurat
9	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup, Dinrumkim	Penyediaan air bersih, stop BABS
10	Pemberdayaan masyarakat	Dinas Pendidikan, Ormas dan LSM	Pelaksanaan edukasi kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
11	Pengembangan kampung KB	Dinsospermasdesp3a	Pengembangan kampung KB

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 19 Permasalahan Pelayanan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga

No	Masalah Pokok	Permasalahan utama	Akar Permasalahan
1	2	3	4
1	Masih adanya kasus kematian ibu	Masih terjadinya kematian ibu saat hamil, bersalin, atau nifas	a. Sebagian besar kasus terjadi akibat adanya pendarahan dan eklamsia serta penyakit degenerative jantung pada ibu hamil b. Kurang optimalnya pemantauan kehamilan risiko tinggi
		Tidak semua ibu melakukan pemeriksaan ANC yang sesuai standar	a. Kurangnya kesadaran ibu terhadap pentingnya ANC b. Dukungan keluarga yang rendah
		Akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas belum merata	a. Belum semua Puskesmas mampu tata laksana PONED
2	Masih tingginya kasus kematian balita	Deteksi dini dan penanganan balita sakit belum optimal	a. Penangan MTBS yang dilakukan di Puskesmas belum optimal, penanganan balita sakit belum semua dilaksanakan sesuai tata laksana b. Pelaksanaan SDIDTK belum optimal, belum semua balita terpantau tumbuh kembangnya mulai dari tingkat paling bawah

No	Masalah Pokok	Permasalahan utama	Akar Permasalahan
1	2	3	4
		Kualitas pelayanan kesehatan anak belum merata	a. Belum semua tenaga kesehatan belum memahami dan menggunakan buku KIA dengan benar
		Masih adanya kematian disebabkan penyakit menular	a. Tingginya kasus diare pada balita b. Santiasi dan air bersih belum optimal
3	Masih adanya kasus gizi di masyarakat	Masih ditemukannya balita stunting, gizi buruk dan gizi kurang	a. Kurangnya pengetahuan keluarga tentang pola asuh, kesehatan dan gizi b. Asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) tidak mencukupi c. Praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) belum optimal d. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan
		Masih adanya ibu hamil dengan status gizi kurang atau KEK	a. Edukasi kesehatan dan gizi pra hamil belum optimal b. Ibu hamil kurang asupan gizi c. Riwayat kehamilan seperti jarak kehamilan dan usia ibu
		Lingkungan keluarga yang kurang mendukung	a. Berdasarkan pendataan faktor determinan stunting yang dilakukan 75,7% balita stunting memiliki keluarga

No	Masalah Pokok	Permasalahan utama	Akar Permasalahan
1	2	3	4
			<p>serumah dengan kebiasaan merokok</p> <p>b. Masih ada orang tua balita bermasalah gizi yang tidak bersedia anaknya dirujuk ke Puskesmas / Rumah Sakit</p>
4	Masih adanya kasus penyakit menular dan semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular	Masih ditemukannya kasus Tuberkulosis	<p>a. Penemuan kasus belum optimal</p> <p>b. Kepatuhan pengobatan rendah</p> <p>c. Masih adanya Angka putus berobat</p>
		Penemuan kasus dan pengobatan HIV belum optimal	<p>a. Minimnya skrining HIV di komunitas</p> <p>b. Rasa takut dan malu untuk memeriksakan diri</p> <p>c. Stigma terhadap layanan tes HIV (VCT/PITC)</p> <p>d. Banyaknya pasien yang tidak mau berobat setelah didiagnosis</p> <p>e. Kepatuhan pengobatan masih rendah</p> <p>f. Edukasi masih kurang terhadap pasien tentang pentingnya tes VL</p> <p>g. Belum adanya lab rujukan tes VL di Purbalingga</p>
		Sanitasi lingkungan belum mendukung pengendalian penyakit	<p>a. Akses air bersih belum merata</p> <p>b. Belum semua rumah tangga memiliki jamban sehat</p>

No	Masalah Pokok	Permasalahan utama	Akar Permasalahan
1	2	3	4
		Meningkatnya kasus penyakit tidak menular (Hipertensi, diabetes)	a. Gaya hidup tidak sehat (pola makan tinggi gula/lemak, kurang aktivitas fisik) b. Kebiasaan merokok
		Deteksi dini dan skrining PTM belum optimal	a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk periksa kesehatan secara berkala b. BMHP yang masih terbatas c. Jam layanan kesehatan tidak sesuai waktu warga terutama untuk sasaran usia produktif yang bekerja d. Kurangnya kepatuhan pasien PTM terhadap pengobatan
5	Belum optimalnya kualitas kesehatan lingkungan	Belum optimalnya kualitas air minum	a. Belum semua sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas air minumnya tidak memenuhi syarat b. Tidak semua penyedia air minum menerapkan standar pengolahan air bersih sesuai ketentuan
		Belum optimalnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	a. Perilaku hidup bersih dan sehat belum membudaya b. Pengelolaan limbah rumah tangga masih rendah
6	Belum Optimalnya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat melalui UKBM (Posyandu, Posbindu, dsb.) belum optimal	a. Cakupan posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) belum optimal

No	Masalah Pokok	Permasalahan utama	Akar Permasalahan
1	2	3	4
			b. kemitraan kesehatan masyarakat belum optimal c. masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat
7	Sebagian Kader Instusi Masyarakat Pedesaan atau (IMP) SDM nya masih relatif rendah.	Kader IMP masih kurang terlatih dalam konseling pada calon akseptor khususnya Medis Opeasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP).	a. Minimnya pelatihan teknis konseling b. Alokasi Anggaran pelatihan teknis terbatas

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berikut tabel pemetaan isu strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga:

Tabel 2. 20 Isu Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga

Potensi yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya kasus kematian ibu Masih tingginya kasus kematian balita Masih adanya kasus gizi di masyarakat Masih adanya kasus penyakit menular dan semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular Belum Optimalnya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Kualitas hidup sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan dan pemerataan distribusi kesejahteraan Ancaman penurunan kualitas dan distribusi sumber daya air akibat belum optimalnya pengelolaan sanitasi 	<ol style="list-style-type: none"> <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's) nomer 3 : Good health and well being dengan 13 target 	<ol style="list-style-type: none"> Enam pilar Transformasi sistem kesehatan nasional Peningkatan angka penyakit tidak menular Stunting dan gizi buruk Penurunan angka kematian ibu dan balita Transformasi digital kesehatan 	Peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kematian ibu dan balita Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular Penyakit menular belum terkendali sepenuhnya Kualitas layanan kesehatan dan kepuasan pasien belum optimal Digitalisasi layanan kesehatan belum optimal

Potensi yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	6. Belum optimalnya kualitas kesehatan lingkungan					
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Penangan Total Fertility Rate (TFR). Di dalam RPJMN dan RENSTRA BKKBN, TFR menjadi salah satu target Indikator kinerja,dimana TFR tersebut di tetapkan dengan nilai 2.1 yang artinya kebijakan kependudukan perlu tumbuh seimbang					1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program KB

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga

Visi Pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 diadopsi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga yakni **"AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA"**.

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, telah ditetapkan Misi pembangunan daerah yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Bupati Purbalingga Terpilih tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Misi 1 : Bangkitkan Ekonomi Rakyat
2. Misi 2 : Akselerasi Pembangunan Insfraktur Berkelanjutan
3. Misi 3 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
4. Misi 4 : Unggulkan kualitas Sumber Daya Manusia

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 sebagai upaya dalam menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Purbalingga periode 2025-2029, terutama misi keempat yaitu Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Misi keempat ini dijabarkan ke dalam tujuan perangkat daerah, yaitu suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan menjadi dasar menyusun strategi pembangunan. Tujuan dari pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2025-2029 adalah **"Terwujudnya masyarakat yang sehat dan keluarga berkualitas"** dengan indikator kinerja tujuan adalah Usia Harapan Hidup (UHH) dan Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga).

3.1.2 Sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Terwujudnya masyarakat yang sehat dan keluarga berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta pemerataan layanan kesehatan

dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan
- b. Persentase Penurunan Kasus Kematian Ibu
- c. Angka Kematian Balita
- d. Prevalensi Stunting
- e. Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)
- f. Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)
- g. Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Jumlah Penduduk
- h. Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Makanan Minuman yang Memenuhi Standar

2. Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang

Dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

- a. Rata-rata Angka Kelahiran Total / TFR

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

- a. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NSPK: Pembinaan dan pemerataan SDM Kesehatan, Peningkatan mutu dan akses fasilitas kesehatan, Layanan gratis, eliminasi penyakit menular, pengendalian PTM, penanggulangan stunting, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Terwujudnya masyarakat yang sehat dan keluarga berkualitas		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,19	74,23	74,61	74,99	75,37	75,74	76,12	
			Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,03	65,08-65,11	65,85-65,89	66,61-66,68	67,38-67,47	68,14-68,26	68,91-69,04	
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta pemerataan layanan kesehatan	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Persen		87,31	87,81	88,31	88,81	89,31	89,81	
			Persentase Penurunan Kasus Kematian Ibu	Persen	18,18	9,09	10,00	10,00	11,11	11,11	12,50	
			Angka Kematian Balita	Per 1000 KH	15,76	15,3	14,8	14,5	14,3	14	13,8	
			Prevalensi Stunting	Persen	26	22,1	21,98	20,86	19,75	18,63	17,5	
		Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	Persen	NA	81,82	82,61	86,96	91,30	95,65	100		

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sasaran RPJMD yang relevan: Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul serta Ketahanan Sosial yang Adaptif			Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	Persen	NA	9,09	13,04	17,39	21,74	26,09	30,43	
			Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Jumlah Penduduk	Per 1000 penduduk		2,43	2,47	2,5	2,53	2,56	2,59	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Makanan Minuman yang Memenuhi Standar	Persen	69,52	88,31	94,21	94,55	96,39	96,54	96,71	
		Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Rata-rata Angka Kelahiran Total / TFR	Angka	2,1	2,17-2,1	2,16-2,09	2,16-2,09	2,15-2,08	2,14-2,08	2,13-2,07	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka	73,81	74	74,31	74,41	74,51	74,61	74,71	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
		Keluarga Berencana										

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi

Strategi Renstra Perangkat Daerah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran Renstra Perangkat Daerah. Tahapan strategi Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Tahapan Strategi Dalam Rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
<ol style="list-style-type: none"> Penguatan Sumber Daya Kesehatan Penguatan tata kelola dan pelayanan kesehatan Pengembangan dasar dengan melakukan analisis kebutuhan dan analisis masalah masyarakat penanganan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana 	<ol style="list-style-type: none"> Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat Penguatan layanan dasar kesehatan dan gizi Pembangunan kapasitas melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis ataupun lokakarya dalam mengelola sumber daya urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana 	<ol style="list-style-type: none"> Percepatan eliminasi penyakit prioritas Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan Implementasi program/kegiatan/sub kegiatan dalam Pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) Penguatan Sistem Kesehatan dan pengembangan program dengan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan Evaluasi capaian & penyusunan arah baru Terwujudnya masyarakat mandiri dilihat dari aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

3.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Renstra perangkat daerah adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam mencapai target tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah.

Keterkaitan Operasionalisasi NSPK, Arah Kebijakan RPJMD dan Arah Kebijakan Perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD
1	2	3	4	5
1	NSPK: Pembinaan dan pemerataan SDM Kesehatan, Peningkatan mutu dan akses fasilitas kesehatan, Layanan gratis, eliminasi penyakit menular, pengendalian PTM, penanggulangan stunting, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Sasaran RPJMD yang relevan: Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul serta Ketahanan Sosial yang Adaptif	Pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah	Penguatan Sumber Daya Kesehatan	1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia kesehatan 2. Pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan 3. Pemenuhan obat dan vaksin
		Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar	Penguatan tata kelola dan pelayanan kesehatan	1. Penguatan layanan kesehatan primer 2. Penguatan layanan kesehatan rujukan 3. Penguatan tata kelola, data, informasi 4. Peningkatan pemenuhan jaminan kesehatan nasional
		Penguatan promotif-preventif melalui edukasi masyarakat	Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat	1. Pemetaan faktor resiko dan determinan kesehatan 2. Peningkatan deteksi dini penyakit 3. Pemenuhan sumber daya untuk

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD
1	2	3	4	5
				mendukung skrining / cek kesehatan 4. Pengendalian penyakit menular 5. Pengendalian penyakit tidak menular 6. Pemanfaat media digital dan sosial untuk edukasi kesehatan 7. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM
			Penguatan layanan dasar kesehatan dan gizi	1. Penguatan UKM dan UKP 2. Penurunan kematian ibu dan anak 3. Pencegahan dan penurunan stunting 4. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia serta KB-kespro
			Percepatan eliminasi penyakit prioritas	1. Optimalisasi surveilans epidemiologi berbasis masyarakat dan digital 2. Percepatan eliminasi TBC 3. Penguatan layanan penyakit tidak menular

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD
1	2	3	4	5
			Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak 2. Pengendalian pencemaran lingkungan 3. Penguatan Upaya Kesehatan Lingkungan di Fasyankes & Komunitas
			Penguatan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemitraan kesehatan masyarakat 2. Peningkatan cakupan Posyandu ILP
			Penguatan Sistem Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kualitas data kesehatan agar lebih akurat, cepat, dan real time 2. Integrasi sistem informasi kesehatan
			Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana 2. Meningkatkan literasi kesehatan masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana dan pandemi 3. penguatan sistem pengawasan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD
1	2	3	4	5
				pangan, sediaan farmasi
		Penguatan keluarga berencana melalui penyuluhan, layanan konseling, dan pendidikan pranikah berbasis nilai lokal.	Penguatan keluarga berencana melalui penyuluhan, layanan konseling, dan pendidikan pranikah berbasis nilai lokal.	1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan prioritas pada penyediaan Alokon dan peningkatan kesadaran Masyarakat
			Penguatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) di mana penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Kesehatan Daerah untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Berikut ini Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output:

Tabel 4. 1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
NSPK: Pembinaan dan pemerataan SDM Kesehatan, Peningkatan mutu dan akses fasilitas kesehatan, Layanan gratis, eliminasi penyakit menular, pengendalian PTM, penanggulangan stunting, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Sasaran RPJMD yang relevan:	Terwujudnya masyarakat yang sehat dan keluarga berkualitas				Usia Harapan Hidup		

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul serta Ketahanan Sosial yang Adaptif							
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Nilai SAKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
			Terpenuhinya layanan penunjang urusan perangkat daerah secara optimal		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	
				<i>Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Tersusunnya laporan admnistrasi keuangan tepat waktu</i>	<i>Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				<i>Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan</i>	<i>Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				<i>Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan</i>	<i>Terpenuhinya kewajiban jam latihan ASN</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				<i>Terpenuhinya layanan administasi umum</i>	<i>Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				<i>Terpenuhinya sarana prasarana kerja</i>	<i>Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				<i>Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<i>Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta pemerataan layanan kesehatan			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya pelayanan BLUD di RSUD dan Puskesmas		Cakupan Fasyankes dengan status BLUD Penuh	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				<i>Tersedianya pelayanan dan penunjang BLUD</i>	<i>Persentase Fasyankes yang menerapkan PPK BLUD</i>	<i>Peningkatan Pelayanan BLUD</i>	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
			Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan standarisasi pelayanan di FKTP dan FKRTL		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				<i>Tersedianya fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan perbekalan untuk FKTP dan FKRTL dalam rangka Pengembangan Fasilitas Kesehatan</i>	<i>Persentase RS Pemerintah Daerah dan Puskesmas yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar</i>	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Pembangunan Puskesmas	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Pengembangan Puskesmas	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
					Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Pengembangan Rumah Sakit	
					<i>Persentase Fasyankes dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar</i>	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan dalam rangka penjaminan mutu pelayanan dan keselamatan pasien</i>	<i>Persentase fasyankes yang dilakukan monitoring dan evaluasi</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
					<i>Cakupan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya yang dibina</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
				<i>Terselenggaranya sistem informasi kesehatan terintegrasi untuk mendukung ketersediaan data yang akurat dan pemanfaatan dalam pembangunan kesehatan</i>	<i>Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional</i>	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Infomasi Kesehatan	
				<i>Terselenggaranya pemberian izin praktik tenaga kesehatan dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan</i>	<i>Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang berizin</i>	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar		
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
					Persentase penurunan kasus kematian ibu		
			Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka penurunan kasus kematian ibu, kematian balita dan penurunan prevalensi stunting		Jumlah kematian ibu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				<i>Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pengelolaan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, dan pengelolaan gizi masyarakat</i>	<i>Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					<i>Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai standar</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
					Angka Kematian Balita (AKBA)		
			Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka penurunan kasus kematian ibu, kematian balita dan penurunan prevalensi stunting		Jumlah kematian balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				<i>Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pengelolaan pelayanan kesehatan</i>	<i>Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>ibu, kesehatan anak, dan pengelolaan gizi masyarakat</i>			
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
				<i>Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pengelolaan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, dan pengelolaan gizi masyarakat</i>	<i>Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan pelayanan imunisasi	
					Prevalensi Stunting		
			Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka penurunan kasus kematian ibu, kematian balita dan		Prevalensi wasting balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			penurunan prevalensi stunting				
				<i>Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pengelolaan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, dan pengelolaan gizi masyarakat</i>	<i>Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)		
			Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				<i>Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka</i>	<i>Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>pelayanan kesehatan dan pengelolaan jaminan masyarakat</i>			
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana serta peningkatan deteksi dini penyakit tidak menular dan menular		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				<i>Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia,</i>	<i>Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<p>pengelolaan pelayanan penyakit tidak menular dan penyakit menular, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan pelayanan surveilan kesehatan serta kejadian tertentu</p>			
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
				<p>Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia, pengelolaan pelayanan penyakit tidak menular dan penyakit menular, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan pelayanan surveilan</p>	<p>Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar</p>	<p>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>kesehatan serta kejadian tertentu</i>			
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
				<i>Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia, pengelolaan pelayanan penyakit tidak menular dan penyakit menular, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan pelayanan surveilan kesehatan serta kejadian tertentu</i>	<i>Persentase lanjut usia yang mandiri</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia, pengelolaan pelayanan penyakit tidak menular dan penyakit menular, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan pelayanan surveilan kesehatan serta kejadian tertentu	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
				Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia, pengelolaan pelayanan penyakit	Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>tidak menular dan penyakit menular, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan pelayanan surveilan kesehatan serta kejadian tertentu</i>			
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
				<i>Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia, pengelolaan pelayanan penyakit tidak menular dan penyakit menular, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan pelayanan surveilan kesehatan serta kejadian tertentu</i>	<i>Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
				<i>Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia, pengelolaan pelayanan penyakit tidak menular dan penyakit menular, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan pelayanan surveilan kesehatan serta kejadian tertentu</i>	<i>Persentase Depresi yang mendapat layanan</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia, pengelolaan pelayanan penyakit tidak menular dan penyakit menular, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan pelayanan surveilan kesehatan serta kejadian tertentu</i>	<i>Persentase merokok penduduk 10-21 tahun</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
				<i>Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia, pengelolaan pelayanan penyakit</i>	<i>Prevalensi Obesitas</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>tidak menular dan penyakit menular, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan pelayanan surveilan kesehatan serta kejadian tertentu</i>			
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
				<i>Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia, pengelolaan pelayanan penyakit tidak menular dan penyakit menular, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan pelayanan surveilan kesehatan serta kejadian tertentu</i>	<i>Persentase UKK yang dibina</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup		Persentase Rumah Tangga dengan Aktivitas Fisik Cukup	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
				<i>Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dalam rangka pembangunan kesehatan</i>	<i>Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif</i>	<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				<i>Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif untuk mendorong</i>	<i>Persentase Rumah Tangga Sehat</i>	<i>Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>perilaku hidup sehat masyarakat</i>			
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
				<i>Terlaksananya pengembangan dan pelaksanaan UKBM untuk mendukung kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan</i>	<i>Persentase UKBM yang dilakukan bimtek dan supervisi</i>	<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
					Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)		
			Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan lingkungan, pencegahan dan		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TSR)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			pengendalian KLB dan bencana serta peningkatan deteksi dini penyakit menular dan				
				<i>Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia, pengelolaan pelayanan penyakit tidak menular dan penyakit menular, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan pelayanan surveilan kesehatan serta kejadian tertentu</i>	<i>Cakupan penemuan kasus TB</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana serta peningkatan deteksi dini penyakit tidak menular dan menular		Insidensi HIV	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia, pengelolaan pelayanan penyakit tidak menular dan penyakit menular, pengelolaan kesehatan	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>lingkungan, dan pelayanan surveilan kesehatan serta kejadian tertentu</i>			
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
			Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana serta peningkatan deteksi dini penyakit tidak menular dan menular		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				<i>Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk anak usia</i>	<i>Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>pendidikan dasar, usia produktif, lansia, pengelolaan pelayanan penyakit tidak menular dan penyakit menular, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan pelayanan surveilan kesehatan serta kejadian tertentu</i>			
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana serta peningkatan deteksi dini penyakit tidak		Persentase kegiatan surveilan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana serta kejadian tertentu yang dilaksanakan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			menular dan menular				
				Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia, pengelolaan pelayanan penyakit tidak menular dan penyakit menular, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan pelayanan surveilan kesehatan serta kejadian tertentu	Persentase penanganan KLB dan bencana kurang dari 24 jam	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
				Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia,	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>pengelolaan pelayanan penyakit tidak menular dan penyakit menular, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan pelayanan surveilan kesehatan serta kejadian tertentu</i>			
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
				<i>Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia, pengelolaan pelayanan penyakit tidak menular dan</i>	<i>Annual Parasite Incidence (API) Malaria</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>penyakit menular, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan pelayanan surveilan kesehatan serta kejadian tertentu</i>			
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	
				<i>Terlaksananya pengembangan dan pelaksanaan UKBM untuk mendukung kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan</i>	<i>Persentase jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i>	<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
					Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Jumlah Penduduk		
			Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam rangka peningkatan		Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			ketersediaan, kompetensi serta pemerataan SDM				
				<i>Tersusunnya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam rangka mendukung ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan pelayanan kesehatan yang bermutu</i>	<i>Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan</i>	<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				<i>Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan dalam rangka mewujudkan</i>	<i>Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan</i>	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas</i>			
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam rangka peningkatan ketersediaan, kompetensi serta pemerataan SDM		Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				<i>Terselenggaranya pemberian izin praktik tenaga kesehatan dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan</i>	<i>Persentase surat izin praktik bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang menjalankan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan</i>	<i>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
				<i>Terselenggaranya pemberian izin praktik tenaga kesehatan dalam rangka</i>	<i>Persentase SDM kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan</i>	<i>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>menjamin mutu pelayanan kesehatan</i>			
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Makanan Minuman yang Memenuhi Standar		
			Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dalam rangka peningkatan standarisasi pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku		Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
				<i>Terlaksananya pengawasan dan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai standar</i>	<i>Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan</i>	<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dalam rangka peningkatan standarisasi pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
				<i>Terlaksananya penerbitan SPP-IRT dan Nomor P-IRT dalam rangka menjamin keamanan pangan industri rumah tangga</i>	<i>Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar</i>	<i>Penerbitan Sertifikat produksi Pangan Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				<i>Terlaksananya penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM dalam rangka menjamin keamanan pangan dan kesehatan masyarakat</i>	<i>Persentase TPM yang dilakukan pengendalian dan pengawasan serta ditindaklanjuti</i>	<i>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
				<i>Terlaksananya pemeriksaan dan tindak lanjut post market produk pangan industri rumah tangga dalam</i>	<i>Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu</i>	<i>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>rangka menjamin keamanan pangan</i>			
					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
					Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)		
		Terwujudnya masyarakat yang sehat dan keluarga berkualitas			Rata-rata Angka Kelahiran Total / TFR		
			Meningkatnya upaya pengendalian pertumbuhan penduduk		Median Usia Kawin Pertama	Program Pengendalian Penduduk	
				<i>Terlaksananya internalisasi dan integrasi kebijakan pengendalian penduduk</i>	<i>Persentase terpenuhinya Program Bangga Kencana</i>	<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	
					Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
					Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	
				<i>Terlaksananya pengolahan dan pelaporan kependudukan</i>	<i>Cakupan wilayah yang melaksanakan pengolahan data dan pelaporan</i>	<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
					Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	
			Meningkatnya upaya dalam pencegahan		Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			kehamilan tidak diinginkan				
				Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pengendalian penduduk	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				<i>Terlaksananya pendayagunaan oleh tenaga penyuluh</i>	<i>Persentase laporan kegiatan kader PKB/PLKB</i>	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
				<i>Terlaksananya pelayanan Keluarga Berencana</i>	<i>Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern</i>	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				<i>Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB</i>	<i>Proporsi Kampung KB Mandiri</i>	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	
					Jumlah DASHAT di Kampung KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)		Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Aktif	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
				<i>Terlaksananya kegiatan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</i>	<i>Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)</i>	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang Mendapatkan Pendampingan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
				<i>Terlaksananya peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga</i>	<i>Persentase Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang aktif</i>	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin /Kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	

Rincian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja berikut target dan pagu pendanaan indikatif yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				456.552.782.000		479.880.421.000		503.995.991.000		528.951.388.000		554.301.100.000		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				371.290.394.000		389.854.913.000		409.347.660.000		429.815.042.000		451.305.794.000		
Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan (%)	100	100	125.724.526.000	100	132.010.749.000	100	138.611.281.000	100	145.541.834.000	100	152.818.916.000	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				125.724.526.000		132.010.749.000		138.611.281.000		145.541.834.000		152.818.916.000		
Tersusunnya laporan administrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	54	100	125.724.526.000	100	132.010.749.000	100	138.611.281.000	100	145.541.834.000	100	152.818.916.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				125.564.600.000		131.842.826.000		138.434.961.000		145.356.697.000		152.624.522.000		

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.627	1.829	125.564.600.000	1.854	131.842.826.000	1.879	138.434.961.000	1.904	145.356.697.000	1.929	152.624.522.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				67.378.000		70.747.000		74.285.000		78.000.000		81.900.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	54	60	67.378.000	60	70.747.000	60	74.285.000	60	78.000.000	60	81.900.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				92.548.000		97.176.000		102.035.000		107.137.000		112.494.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	92.548.000	1	97.176.000	1	102.035.000	1	107.137.000	1	112.494.000		DINKESPPKB
Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan (%)	100	100	1.128.582.000	100	1.185.014.000	100	1.244.270.000	100	1.306.494.000	100	1.371.827.000		
	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang (%)	100	100		100		100		100		100			
1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.800.000		5.040.000		5.292.000		5.557.000		5.835.000		
Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan (%)	100	100	4.800.000	100	5.040.000	100	5.292.000	100	5.557.000	100	5.835.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.800.000		5.040.000		5.292.000		5.557.000		5.835.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	4.800.000	1	5.040.000	1	5.292.000	1	5.557.000	1	5.835.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.000.000		6.300.000		6.615.000		6.947.000		7.295.000		
Meningkatnya kapasitas ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan (%)	100	100		100		100		100		100			DINKESPPKB

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				4.000.000		4.200.000		4.410.000		4.631.000		4.863.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	36	36	4.000.000	36	4.200.000	36	4.410.000	36	4.631.000	36	4.863.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2.000.000		2.100.000		2.205.000		2.316.000		2.432.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	30	2.000.000	30	2.100.000	30	2.205.000	30	2.316.000	30	2.432.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				88.950.000		93.398.000		98.070.000		102.977.000		108.128.000		
Terpenuhinya layanan administrasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum (%)	100	100	88.950.000	100	93.398.000	100	98.070.000	100	102.977.000	100	108.128.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		2.625.000		2.757.000		2.895.000		3.040.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.500.000	1	2.625.000	1	2.757.000	1	2.895.000	1	3.040.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				54.450.000		57.173.000		60.032.000		63.034.000		66.186.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	54.450.000	1	57.173.000	1	60.032.000	1	63.034.000	1	66.186.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.200.000		2.310.000		2.426.000		2.548.000		2.676.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	2.200.000	12	2.310.000	12	2.426.000	12	2.548.000	12	2.676.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		10.500.000		11.025.000		11.577.000		12.156.000		

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	10.000.000	12	10.500.000	12	11.025.000	12	11.577.000	12	12.156.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11.000.000		11.550.000		12.128.000		12.735.000		13.372.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	25	11.000.000	25	11.550.000	25	12.128.000	25	12.735.000	25	13.372.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				8.800.000		9.240.000		9.702.000		10.188.000		10.698.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	9	9	8.800.000	9	9.240.000	9	9.702.000	9	10.188.000	9	10.698.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31.500.000		33.075.000		34.729.000		36.466.000		38.290.000		
Terpenuhi sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja (%)	100	100	31.500.000	100	33.075.000	100	34.729.000	100	36.466.000	100	38.290.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.500.000		33.075.000		34.729.000		36.466.000		38.290.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	3	31.500.000	3	33.075.000	3	34.729.000	3	36.466.000	3	38.290.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				579.981.000		608.982.000		639.433.000		671.408.000		704.981.000		
Terpenuhi jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang (%)	100	100	579.981.000	100	608.982.000	100	639.433.000	100	671.408.000	100	704.981.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				800.000		840.000		882.000		927.000		974.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	800.000	1	840.000	1	882.000	1	927.000	1	974.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				311.604.000		327.185.000		343.545.000		360.723.000		378.760.000		

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48	311.604.000	48	327.185.000	48	343.545.000	48	360.723.000	48	378.760.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.973.000		12.572.000		13.201.000		13.862.000		14.556.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	11.973.000	12	12.572.000	12	13.201.000	12	13.862.000	12	14.556.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				255.604.000		268.385.000		281.805.000		295.896.000		310.691.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	6	255.604.000	6	268.385.000	6	281.805.000	6	295.896.000	6	310.691.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				417.351.000		438.219.000		460.131.000		483.139.000		507.298.000		
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	417.351.000	100	438.219.000	100	460.131.000	100	483.139.000	100	507.298.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				347.351.000		364.719.000		382.955.000		402.103.000		422.209.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	43	43	347.351.000	43	364.719.000	43	382.955.000	43	402.103.000	43	422.209.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000		47.250.000		49.613.000		52.094.000		54.699.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40	40	45.000.000	40	47.250.000	40	49.613.000	40	52.094.000	40	54.699.000		DINKESPPKB

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		26.250.000		27.563.000		28.942.000		30.390.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	25.000.000	2	26.250.000	2	27.563.000	2	28.942.000	2	30.390.000		DINKESPPKB
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan (%)	100	100	8.500.000	100	8.925.000	100	9.372.000	100	9.841.000	100	10.334.000		
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.500.000		8.925.000		9.372.000		9.841.000		10.334.000		
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang tersusun tepat waktu (%)	100	100	8.500.000	100	8.925.000	100	9.372.000	100	9.841.000	100	10.334.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000		5.250.000		5.513.000		5.789.000		6.079.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	5.000.000	3	5.250.000	3	5.513.000	3	5.789.000	3	6.079.000		DINKESPPKB
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.500.000		3.675.000		3.859.000		4.052.000		4.255.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	3.500.000	5	3.675.000	5	3.859.000	5	4.052.000	5	4.255.000		DINKESPPKB
Meningkatnya pelayanan BLUD	Cakupan Fasyankes dengan status BLUD Penuh (%)	100	96,15	244.428.786.000	96,15	256.650.225.000	100	269.482.737.000	100	282.956.873.000	100	297.104.717.000		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				244.428.786.000		256.650.225.000		269.482.737.000		282.956.873.000		297.104.717.000		
Tersedianya pelayanan dan penunjang BLUD	Persentase Fasyankes yang menerapkan PPK BLUD	100	96,15	244.428.786.000	96,15	256.650.225.000	100	269.482.737.000	100	282.956.873.000	100	297.104.717.000		RSUD, LABKESMAS, PUSKESMAS

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				244.428.786.000		256.650.225.000		269.482.737.000		282.956.873.000		297.104.717.000		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	25	25	244.428.786.000	25	256.650.225.000	26	269.482.737.000	26	282.956.873.000	26	297.104.717.000		RSUD, LABKESMAS, PUSKESMAS
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				84.048.729.000		88.751.166.000		93.310.272.000		97.731.383.000		101.520.096.000		
Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan kesepertaan jaminan kesehatan nasional	Cakupan kesepertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	100,66	99,5	26.926.989.000	99,5	28.273.338.000	99,5	29.687.005.000	99,5	31.171.356.000	99,5	32.729.923.000	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				26.926.989.000		28.273.338.000		29.687.005.000		31.171.356.000		32.729.923.000		
Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengelolaan jaminan masyarakat	Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	77,43	81	26.926.989.000	82	28.273.338.000	83	29.687.005.000	84	31.171.356.000	85	32.729.923.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				26.926.989.000		28.273.338.000		29.687.005.000		31.171.356.000		32.729.923.000		DINKESPPKB
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	12	26.926.989.000	12	28.273.338.000	12	29.687.005.000	12	31.171.356.000	12	32.729.923.000		DINKESPPKB
Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan lingkungan, pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana serta peningkatan deteksi dini	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TSR) (%)	90,49	93	5.162.456.000	94	5.420.579.000	95	5.691.608.000	96	5.976.188.000	97	6.274.998.000		

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
penyakit menular dan tidak menular	Persentase kegiatan surveilans kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian KLB dan bencana serta kejadian tertentu yang dilaksanakan (%)	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	9,2	20,92		24,27		27,62		30,13		33,47				
	Insidensi HIV (%)	0,6	0,4		0,3		0,2		0,1		0,1				
	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	0	55		60		65		70		75				
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.162.456.000		5.420.579.000		5.691.608.000		5.976.188.000		6.274.998.000			
Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia, pengelolaan pelayanan penyakit tidak menular dan penyakit menular, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan pelayanan surveilans kesehatan serta kejadian tertentu	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	100	100	5.162.456.000	100	5.420.579.000	100	5.691.608.000	100	5.976.188.000	100	6.274.998.000			
	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar (%)				100		100		100		100				
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)		77		79		81		90		90				
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	100	100		100		100		100		100				

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar (%)	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Depresi yang mendapat layanan (%)	1,5	3		3		4		4		5				
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)		23		22		21		20		19				
	Prevalensi Obesitas (%)		23		23		23		23		23				
	Persentase UKK yang dibina (%)		100		100		100		100		100				
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	106	96		97		98		99		100				
	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar (%)	100	100		100		100		100		100				
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	46	54		58		62		68		70				
	Persentase penanganan KLB dan bencana kurang dari 24 jam (%)	100	100		100		100		100		100				
	Annual Parasite Incidence (API) Malaria (%)	0,01	0		0		0		0		0				
	Persentase jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100				
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				260.660.000		273.693.000		287.378.000		301.747.000		316.835.000			
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	141.976	140.773	260.660.000	140.773	273.693.000	140.773	287.378.000	140.773	301.747.000	140.773	316.835.000		DINKESPPKB, PUSKESMAS	
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				18.150.000		19.058.000		20.011.000		21.012.000		22.063.000			

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	669.907	673.046	18.150.000	679.777	19.058.000	686.575	20.011.000	693.440	21.012.000	700.375	22.063.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				11.240.000		11.797.000		12.379.000		12.998.000		13.648.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	130.053	132.801	11.240.000	134.115	11.797.000	136.180	12.379.000	138.201	12.998.000	141.225	13.648.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				8.200.000		8.610.000		9.041.000		9.494.000		9.969.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	225.689	34.998	8.200.000	35.348	8.610.000	35.702	9.041.000	36.059	9.494.000	36.419	9.969.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				8.300.000		8.715.000		9.151.000		9.609.000		10.090.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	19.124	11.666	8.300.000	11.783	8.715.000	11.901	9.151.000	12.020	9.609.000	12.140	10.090.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				77.091.000		80.946.000		84.994.000		89.233.000		93.687.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	2.637	2.671	77.091.000	2.698	80.946.000	2.725	84.994.000	2.752	89.233.000	2.779	93.687.000		DINKESPPKB, PUSKESMAS
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				199.675.000		209.659.000		220.142.000		231.150.000		242.708.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	15.237	13.437	199.675.000	11.583	209.659.000	10.261	220.142.000	9.254	231.150.000	8.479	242.708.000		DINKESPPKB, PUSKESMAS

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				182.000.000		191.100.000		200.655.000		210.688.000		221.223.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	17.490	14.925	182.000.000	14.776	191.100.000	14.628	200.655.000	14.481	210.688.000	14.336	221.223.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				63.064.000		66.218.000		69.529.000		73.006.000		76.657.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	3	2	63.064.000	2	66.218.000	2	69.529.000	2	73.006.000	2	76.657.000		DINKESPPKB, PUSKESMAS
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				276.200.000		290.010.000		304.511.000		319.737.000		335.724.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	4	4	276.200.000	4	290.010.000	4	304.511.000	4	319.737.000	4	335.724.000		DINKESPPKB, PUSKESMAS
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				267.211.000		280.572.000		294.601.000		309.332.000		324.799.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	8	6	267.211.000	6	280.572.000	6	294.601.000	6	309.332.000	6	324.799.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				734.691.000		771.426.000		809.998.000		850.498.000		893.023.000		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	12	12	734.691.000	12	771.426.000	12	809.998.000	12	850.498.000	12	893.023.000		DINKESPPKB, PUSKESMAS
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				37.320.000		39.186.000		41.146.000		43.204.000		45.365.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	1.586	1.586	37.320.000	1.586	39.186.000	1.586	41.146.000	1.586	43.204.000	1.586	45.365.000		DINKESPPKB, PUSKESMAS
1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan				5.000.000		5.250.000		5.513.000		5.789.000		6.079.000		

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Kesehatan Jiwa dan NAPZA															
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	27	27	5.000.000	27	5.250.000	27	5.513.000	27	5.789.000	27	6.079.000		DINKESPPKB	
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2.532.686.000		2.659.321.000		2.792.288.000		2.931.903.000		3.078.499.000			
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	10	10	2.532.686.000	10	2.659.321.000	10	2.792.288.000	10	2.931.903.000	10	3.078.499.000		DINKESPPKB, PUSKESMAS	
1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				424.763.000		446.002.000		468.303.000		491.719.000		516.305.000			
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	520	4.669	424.763.000	4.669	446.002.000	4.669	468.303.000	4.669	491.719.000	4.669	516.305.000		DINKESPPKB	
1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5.180.000		5.439.000		5.711.000		5.997.000		6.297.000			
Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12	12	5.180.000	12	5.439.000	12	5.711.000	12	5.997.000	12	6.297.000		DINKESPPKB	
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				3.375.000		3.544.000		3.722.000		3.909.000		4.105.000			
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	570	1.749	3.375.000	1.749	3.544.000	1.749	3.722.000	1.452	3.909.000	1.452	4.105.000		PUSKESMAS	
1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan				29.650.000		31.133.000		32.690.000		34.325.000		36.042.000			

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0	1	29.650.000	1	31.133.000	1	32.690.000	1	34.325.000	1	36.042.000		PUSKESMAS
1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				18.000.000		18.900.000		19.845.000		20.838.000		21.880.000		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	1	1	18.000.000	1	18.900.000	1	19.845.000	1	20.838.000	1	21.880.000		DINKESPPKB
Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan standarisasi pelayanan di FKTP dan FKRTL	Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi minimal paripurna (%)	86,44	90	41.380.690.000	91,67	43.949.725.000	95	46.268.759.000	98,33	48.337.794.000	98,33	49.656.828.000		
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	0	78,87		78,87		83,1		83,1		85,92			
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				30.865.747.000		32.909.031.000		34.676.027.000		36.165.420.000		36.875.831.000		
Tersedianya fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan perbekalan untuk FKTP dan FKRTL dalam rangka Pengembangan Fasilitas Kesehatan	Persentase RS Pemerintah Daerah dan Puskesmas yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar (%)	58,33	88	30.865.747.000	92	32.909.031.000	92	34.676.027.000	96	36.165.420.000	100	36.875.831.000		
	Persentase Fasyankes dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)	0	85		88		92		95		96			
1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya				0		0		17.645.460.000		0		0		
Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	0	0	0		0	1	17.645.460.000	0	0	0	0		DINKESPPKB
1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas				0		5.000.000.000		0		6.000.000.000		7.000.000.000		
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat	0	-	0	1	5.000.000.000	0	0	1	6.000.000.000	1	7.000.000.000		DINKESPPKB

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	(Puskesmas) yang Dibangun (Unit)														
1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas				0		500.000.000		500.000.000		525.000.000		0			
Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	0	-	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	525.000.000	0	0		DINKESPPKB	
1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				0		0		0		0		0			
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		DINKESPPKB	
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				1.669.710.000		2.253.191.000		2.487.392.000		2.367.352.000		2.485.720.000			
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	0	1	1.669.710.000	1	2.253.191.000	1	2.487.392.000	1	2.367.352.000	1	2.485.720.000		DINKESPPKB	
1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				693.000.000		727.650.000		764.033.000		802.235.000		842.347.000			
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	0	1	693.000.000	1	727.650.000	1	764.033.000	1	802.235.000	1	842.347.000		DINKESPPKB	
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				952.000.000		999.600.000		1.049.580.000		1.102.059.000		1.157.162.000			
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	14	50	952.000.000	50	999.600.000	50	1.049.580.000	50	1.102.059.000	50	1.157.162.000		DINKESPPKB	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				135.000.000		141.750.000		148.838.000		156.280.000		164.094.000		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	0	5	135.000.000	10	141.750.000	15	148.838.000	20	156.280.000	25	164.094.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit				17.365.496.000		12.733.771.000		2.000.000.000		14.577.733.000		15.010.008.000		
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1	1	17.365.496.000	1	12.733.771.000	-	2.000.000.000	3	14.577.733.000	3	15.010.008.000		DINKESPPKB, RSUD
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				10.044.040.000		10.546.242.000		10.073.555.000		10.627.233.000		10.208.595.000		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	2	10.044.040.000	2	10.546.242.000	2	10.073.555.000	2	10.627.233.000	2	10.208.595.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				6.501.000		6.827.000		7.169.000		7.528.000		7.905.000		

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	22	23	6.501.000	23	6.827.000	23	7.169.000	23	7.528.000	23	7.905.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.457.808.000		10.980.701.000		11.529.738.000		12.106.228.000		12.711.542.000		
Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan dalam rangka penjaminan mutu pelayanan dan keselamatan pasien	Cakupan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya yang dibina (%)	100	100	10.457.808.000	100	10.980.701.000	100	11.529.738.000	100	12.106.228.000	100	12.711.542.000		
	Persentase fasyankes yang dilakukan monitoring dan evaluasi (%)	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				5.000.000		5.250.000		5.513.000		5.789.000		6.079.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	2	4	5.000.000	4	5.250.000	4	5.513.000	4	5.789.000	4	6.079.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4.608.000		4.839.000		5.081.000		5.336.000		5.603.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	2	9	4.608.000	9	4.839.000	9	5.081.000	9	5.336.000	9	5.603.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				10.142.786.000		10.649.926.000		10.462.423.000		11.741.545.000		12.328.623.000		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	23	10.142.786.000	23	10.649.926.000	23	10.462.423.000	23	11.741.545.000	23	12.328.623.000		DINKESPPKB, PUSKESMAS
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				51.485.000		54.060.000		56.763.000		59.602.000		62.583.000		

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	4	1	51.485.000	8	54.060.000	13	56.763.000	5	59.602.000	2	62.583.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				-		-		720.000.000		-		-		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1	5	-	3	-	43	720.000.000	4	-	-	-		DINKESPPKB
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				253.929.000		266.626.000		279.958.000		293.956.000		308.654.000		
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1	253.929.000	1	266.626.000	1	279.958.000	1	293.956.000	1	308.654.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				45.210.000		47.471.000		49.845.000		52.338.000		54.955.000		
Terselenggaranya sistem informasi kesehatan terintegrasi untuk mendukung ketersediaan data yang akurat dan pemanfaatan dalam pembangunan kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	0	52	45.210.000	55	47.471.000	57	49.845.000	59	52.338.000	61	54.955.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				45.210.000		47.471.000		49.845.000		52.338.000		54.955.000		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	45.210.000	1	47.471.000	1	49.845.000	1	52.338.000	1	54.955.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				11.925.000		12.522.000		13.149.000		13.808.000		14.500.000		

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terselenggaranya pemberian izin praktik tenaga kesehatan dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang berizin (%)	100	100	11.925.000	100	12.522.000	100	13.149.000	100	13.808.000	100	14.500.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				3.750.000		3.938.000		4.135.000		4.342.000		4.560.000		
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	0	51	3.750.000	51	3.938.000	51	4.135.000	51	4.342.000	51	4.560.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000		5.250.000		5.513.000		5.789.000		6.079.000		
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	55	56	5.000.000	56	5.250.000	56	5.513.000	56	5.789.000	56	6.079.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				3.175.000		3.334.000		3.501.000		3.677.000		3.861.000		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	55	60	3.175.000	60	3.334.000	60	3.501.000	60	3.677.000	60	3.861.000		DINKESPPKB
Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka penurunan kasus kematian ibu, kematian balita dan penurunan prevalensi stunting	Jumlah kematian ibu (orang)	11	9	10.578.594.000	9	11.107.524.000	8	11.662.900.000	8	12.246.045.000	7	12.858.347.000		
	Jumlah kematian balita (orang)	182	158		155		152		150		148			

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Prevalensi wasting balita (%)	4,8	7,5		7		6,5		6		5				
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.578.594.000		11.107.524.000		11.662.900.000		12.246.045.000		12.858.347.000			
Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan dalam rangka pengelolaan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, dan pengelolaan gizi masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar (%)	100	100	10.578.594.000	100	11.107.524.000	100	11.662.900.000	100	12.246.045.000	100	12.858.347.000			
	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100				
	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (%)	100	100		100		100		100		100				
	Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya (%)		72		74		76		78		80				
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				2.032.924.000		2.134.571.000		2.241.300.000		2.353.365.000		2.471.034.000			
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.529	11.365	2.032.924.000	10.750	2.134.571.000	10.247	2.241.300.000	9.751	2.353.365.000	9.401	2.471.034.000		DINKESPPKB, PUSKESMAS	
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				121.700.000		127.785.000		134.175.000		140.884.000		147.929.000			
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11.508	10.912	121.700.000	10.285	127.785.000	9.839	134.175.000	9.331	140.884.000	9.021	147.929.000		DINKESPPKB	
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				12.000.000		12.597.000		13.223.000		13.881.000		14.570.000			
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11.377	10.903	12.000.000	10.251	12.597.000	9.809	13.223.000	9.301	13.881.000	9.003	14.570.000		DINKESPPKB	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				18.215.000		19.126.000		20.083.000		21.088.000		22.143.000		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	51.804	52.152	18.215.000	52.152	19.126.000	52.268	20.083.000	52.190	21.088.000	52.203	22.143.000		DINKESPPKB
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				7.507.528.000		7.882.905.000		8.277.051.000		8.690.904.000		9.125.450.000		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	3	4	7.507.528.000	4	7.882.905.000	4	8.277.051.000	4	8.690.904.000	4	9.125.450.000		DINKESPPKB, PUSKESMAS
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				94.950.000		99.698.000		104.683.000		109.918.000		115.414.000		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1	94.950.000	1	99.698.000	1	104.683.000	1	109.918.000	1	115.414.000		PUSKESMAS
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				411.602.000		432.183.000		453.793.000		476.483.000		500.308.000		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	3	3	411.602.000	2	432.183.000	2	453.793.000	2	476.483.000	2	500.308.000		DINKESPPKB, PUSKESMAS
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				379.675.000		398.659.000		418.592.000		439.522.000		461.499.000		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	1	379.675.000	1	398.659.000	1	418.592.000	1	439.522.000	1	461.499.000		PUSKESMAS
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				768.106.000		806.511.000		846.837.000		889.179.000		933.638.000		
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam rangka peningkatan ketersediaan, kompetensi serta pemerataan SDM	Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar (%)	0	88,93	768.106.000	89,33	806.511.000	89,33	846.837.000	89,72	889.179.000	90,91	933.638.000	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	0	100		100		100		100		100				
1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				5.710.000		5.996.000		6.297.000		6.612.000		6.944.000			
Terselenggaranya pemberian izin praktik tenaga kesehatan dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan	Persentase surat izin praktik bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang menjalankan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	91,17	93	5.710.000	94	5.996.000	95	6.297.000	95	6.612.000	95	6.944.000		DINKESPPKB	
1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				3.700.000		3.885.000		4.080.000		4.284.000		4.499.000			
Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	150	24	3.700.000	24	3.885.000	24	4.080.000	24	4.284.000	24	4.499.000		DINKESPPKB	
1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				2.010.000		2.111.000		2.217.000		2.328.000		2.445.000			
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	150	13	2.010.000	13	2.111.000	13	2.217.000	13	2.328.000	13	2.445.000		DINKESPPKB	
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				81.906.000		86.000.000		90.299.000		94.813.000		99.552.000			
Tersusunnya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam rangka mendukung ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan pelayanan kesehatan yang bermutu	Persentase SDM kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan (%)	100	100	81.906.000	100	86.000.000	100	90.299.000	100	94.813.000	100	99.552.000		DINKESPPKB	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				6.795.000		7.135.000		7.492.000		7.867.000		8.261.000		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1.541	2.098	6.795.000	2.377	7.135.000	2.655	7.492.000	2.943	7.867.000	2.943	8.261.000		DINKESPPKB
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				75.111.000		78.865.000		82.807.000		86.946.000		91.291.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	5	5	75.111.000	5	78.865.000	5	82.807.000	5	86.946.000	5	91.291.000		DINKESPPKB
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				680.490.000		714.515.000		750.241.000		787.754.000		827.142.000		
Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan dalam rangka mewujudkan tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas	Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan (%)	100	100	680.490.000	100	714.515.000	100	750.241.000	100	787.754.000	100	827.142.000		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				680.490.000		714.515.000		750.241.000		787.754.000		827.142.000		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	150	160	680.490.000	170	714.515.000	180	750.241.000	190	787.754.000	200	827.142.000		DINKESPPKB
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				196.858.000		206.701.000		217.036.000		227.888.000		239.282.000		

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dalam rangka peningkatan standarisasi pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar (%)	95,58	100	196.858.000	100	206.701.000	100	217.036.000	100	227.888.000	100	239.282.000	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	0	63,29		77,78		80		81,82		90,91			
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				6.182.000		6.492.000		6.817.000		7.158.000		7.516.000		
Terlaksananya pengawasan dan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai standar	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	0	100	6.182.000	100	6.492.000	100	6.817.000	100	7.158.000	100	7.516.000		DINKESPPKB
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				6.182.000		6.492.000		6.817.000		7.158.000		7.516.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	53	46	6.182.000	50	6.492.000	52	6.817.000	57	7.158.000	65	7.516.000		DINKESPPKB
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				4.350.000		4.568.000		4.797.000		5.037.000		5.289.000		

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya penerbitan SPP-IRT dan Nomor P-IRT dalam rangka menjamin keamanan pangan industri rumah tangga	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	0	32,59	4.350.000	38,39	4.568.000	44,19	4.797.000	50,00	5.037.000	50,00	5.289.000		DINKESPPKB
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				4.350.000		4.568.000		4.797.000		5.037.000		5.289.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	150	55	4.350.000	60	4.568.000	65	4.797.000	70	5.037.000	75	5.289.000		
1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				6.000.000		6.300.000		6.615.000		6.946.000		7.294.000		
Terlaksananya penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM dalam rangka menjamin keamanan pangan dan kesehatan masyarakat	Persentase TPM yang dilakukan pengendalian dan pengawasan serta ditindaklanjuti (%)	0	56	6.000.000	60	6.300.000	64	6.615.000	68	6.946.000	70	7.294.000		DINKESPPKB

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				6.000.000		6.300.000		6.615.000		6.946.000		7.294.000		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	10	10	6.000.000	10	6.300.000	10	6.615.000	10	6.946.000	10	7.294.000		DINKESPPKB
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				180.326.000		189.341.000		198.807.000		208.747.000		219.183.000		
Terlaksananya pemeriksaan dan tindak lanjut post market produk pangan industri rumah tangga dalam rangka menjamin keamanan pangan	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu (%)	0	91,18	180.326.000	91,18	189.341.000	94,12	198.807.000	94,12	208.747.000	97,06	219.183.000		
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				180.326.000		189.341.000		198.807.000		208.747.000		219.183.000		
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	119	155	180.326.000	160	189.341.000	165	198.807.000	170	208.747.000	175	219.183.000		DINKESPPKB

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				248.695.000		261.130.000		274.186.000		287.896.000		302.290.000		
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup	Persentase Rumah Tangga dengan Aktivitas Fisik Cukup (%)	81,19	90	248.695.000	91	261.130.000	92	274.186.000	93	287.896.000	94	302.290.000	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				33.040.000		34.692.000		36.427.000		38.249.000		40.162.000		
Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dalam rangka pembangunan kesehatan	Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif (%)	100	100	33.040.000	100	34.692.000	100	36.427.000	100	38.249.000	100	40.162.000		
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				33.040.000		34.692.000		36.427.000		38.249.000		40.162.000		
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	13	4	33.040.000	4	34.692.000	4	36.427.000	4	38.249.000	4	40.162.000		DINKESPPKB
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				55.048.000		57.800.000		60.689.000		63.723.000		66.907.000		
Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif untuk mendorong perilaku hidup sehat masyarakat	Persentase Rumah Tangga Sehat (%)	94,6	95,46	55.048.000	95,84	57.800.000	96,22	60.689.000	96,60	63.723.000	96,98	66.907.000		
1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				55.048.000		57.800.000		60.689.000		63.723.000		66.907.000		

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	3	3	55.048.000	3	57.800.000	3	60.689.000	3	63.723.000	3	66.907.000		DINKESPPKB
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				160.607.000		168.638.000		177.070.000		185.924.000		195.221.000		DINKESPPKB
Terlaksananya pengembangan dan pelaksanaan UKBM untuk mendukung kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan	Persentase UKBM yang dilakukan bimtek dan supervisi (%)	78	78,5	160.607.000	79,0	168.638.000	79,5	177.070.000	80,0	185.924.000	80,5	195.221.000	81,0	DINKESPPKB
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				160.607.000		168.638.000		177.070.000		185.924.000		195.221.000		DINKESPPKB
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	6	6	160.607.000	6	168.638.000	6	177.070.000	6	185.924.000	6	195.221.000		DINKESPPKB
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				13.206.903.000		13.867.248.000		14.560.610.000		15.288.641.000		16.053.073.000		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				501.085.000		526.139.000		552.446.000		580.069.000		609.072.000		
Meningkatnya upaya pengendalian pertumbuhan penduduk	Median Usia Kawin Pertama (MKUP) (%)	20,9	21	501.085.000	21,3	526.139.000	21,3	552.446.000	21,5	580.069.000	21,5	609.072.000	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				9.920.000		10.415.000		10.936.000		11.483.000		12.057.000		
Terlaksananya internalisasi dan integrasi kebijakan pengendalian penduduk	Persentase terpenuhinya Program Bangga Kencana (%)	100	100	9.920.000	100	10.415.000	100	10.936.000	100	11.483.000	100	12.057.000		
2.14.02.2.01.0016 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				3.957.000		4.154.000		4.362.000		4.580.000		4.809.000		
Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	1	1	3.957.000	1	4.154.000	1	4.362.000	1	4.580.000	1	4.809.000		DINKESPPKB
2.14.02.2.01.0017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				2.400.000		2.520.000		2.646.000		2.779.000		2.918.000		
Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	1	1	2.400.000	1	2.520.000	1	2.646.000	1	2.779.000	1	2.918.000		DINKESPPKB
2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana				3.563.000		3.741.000		3.928.000		4.124.000		4.330.000		
Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	4	4	3.563.000	4	3.741.000	4	3.928.000	4	4.124.000	4	4.330.000		DINKESPPKB
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				491.165.000		515.724.000		541.510.000		568.586.000		597.015.000		
Terlaksananya pengolahan dan pelaporan data kependudukan	Cakupan wilayah yang melaksanakan pengolahan data dan pelaporan	100	100	491.165.000	100	515.724.000	100	541.510.000	100	568.586.000	100	597.015.000		

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				62.094.000		65.199.000		68.459.000		71.882.000		75.476.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	3	3	62.094.000	3	65.199.000	3	68.459.000	3	71.882.000	3	75.476.000		DINKESPPKB
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				223.200.000		234.360.000		246.078.000		258.382.000		271.301.000		
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	18	18	223.200.000	18	234.360.000	18	246.078.000	18	258.382.000	18	271.301.000		DINKESPPKB
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				198.691.000		208.626.000		219.057.000		230.010.000		241.510.000		
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	18	18	198.691.000	18	208.626.000	18	219.057.000	18	230.010.000	18	241.510.000		DINKESPPKB
2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				7.180.000		7.539.000		7.916.000		8.312.000		8.728.000		
Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	2	2	7.180.000	2	7.539.000	2	7.916.000	2	8.312.000	2	8.728.000		DINKESPPKB
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				7.449.075.000		7.821.529.000		8.212.605.000		8.623.235.000		9.054.397.000		

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya upaya dalam pencegahan kehamilan tidak diinginkan	Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (%)	1,40	1,40	7.449.075.000	1,40	7.821.529.000	1,35	8.212.605.000	1,3	8.623.235.000	1,3	9.054.397.000	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.178.358.000		1.237.276.000		1.299.140.000		1.364.096.000		1.432.301.000		
Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pengendalian penduduk	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	19,8	19,2	1.178.358.000	18,9	1.237.276.000	18,6	1.299.140.000	18,3	1.364.096.000	18,0	1.432.301.000		
2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK				-		-		-		-		-		
Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		DINKESPPKB
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana				612.000.000		642.600.000		674.730.000		708.466.000		743.889.000		
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	18	18	612.000.000	18	642.600.000	18	674.730.000	18	708.466.000	18	743.889.000		DINKESPPKB
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				243.000.000		255.150.000		267.907.000		281.303.000		295.368.000		

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	18	18	243.000.000	18	255.150.000	18	267.907.000	18	281.303.000	18	295.368.000		DINKESPPKB
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				130.420.000		136.941.000		143.788.000		150.977.000		158.526.000		
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	12	12	130.420.000	12	136.941.000	12	143.788.000	12	150.977.000	12	158.526.000		
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				16.088.000		16.892.000		17.737.000		18.623.000		19.554.000		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	3	3	16.088.000	3	16.892.000	3	17.737.000	3	18.623.000	3	19.554.000		DINKESPPKB
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada				176.850.000		185.693.000		194.978.000		204.727.000		214.964.000		

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Stakeholders dan Mitra Kerja															
Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	30	30	176.850.000	30	185.693.000	30	194.978.000	30	204.727.000	30	214.964.000			
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				1.340.800.000		1.407.840.000		1.478.232.000		1.552.144.000		1.629.751.000			
Terlaksananya pendayagunaan oleh tenaga penyuluh	Persentase laporan kegiatan kader PKB/PLKB (%)	100	100	1.340.800.000	100	1.407.840.000	100	1.478.232.000	100	1.552.144.000	100	1.629.751.000		DINKESPPKB	
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				1.340.800.000		1.407.840.000		1.478.232.000		1.552.144.000		1.629.751.000			
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	1.813	1.813	1.340.800.000	1.813	1.407.840.000	1.813	1.478.232.000	1.813	1.552.144.000	1.813	1.629.751.000		DINKESPPKB	
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				4.662.617.000		4.895.748.000		5.140.535.000		5.397.562.000		5.667.440.000			
Terlaksananya pelayanan Keluarga Berencana	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (%)	90,01	90,01	4.662.617.000	90,20	4.895.748.000	90,40	5.140.535.000	90,60	5.397.562.000	90,60	5.667.440.000			
2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				30.600.000		32.130.000		33.736.000		35.423.000		37.194.000			

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	49	62	30.600.000	62	32.130.000	62	33.736.000	62	35.423.000	62	37.194.000		DINKESPPKB
2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				4.597.066.000		4.826.919.000		5.068.265.000		5.321.678.000		5.587.762.000		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	4.387	4.387	4.597.066.000	4.387	4.826.919.000	4.387	5.068.265.000	4.387	5.321.678.000	4.387	5.587.762.000		DINKESPPKB
2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				3.320.000		3.486.000		3.660.000		3.843.000		4.035.000		
Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)	3	3	3.320.000	3	3.486.000	3	3.660.000	3	3.843.000	3	4.035.000		DINKESPPKB
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				31.631.000		33.213.000		34.874.000		36.618.000		38.449.000		
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	12	12	31.631.000	12	33.213.000	12	34.874.000	12	36.618.000	12	38.449.000		DINKESPPKB
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				267.300.000		280.665.000		294.698.000		309.433.000		324.905.000		

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Proporsi Kampung KB Mandiri (%)		0,84	267.300.000	0,84	280.665.000	1,26	294.698.000	1,26	309.433.000	1,26	324.905.000		
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				-		-		-		-		-		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		DINKESPPKB
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				267.300.000		280.665.000		294.698.000		309.433.000		324.905.000		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	36	92	267.300.000	92	280.665.000	92	294.698.000	92	309.433.000	92	324.905.000		DINKESPPKB
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				5.256.743.000		5.519.580.000		5.795.559.000		6.085.337.000		6.389.604.000		
Meningkatnya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Aktif (%)	62,99	62,99	5.256.743.000	63	5.519.580.000	63,02	5.795.559.000	63,05	6.085.337.000	63,05	6.389.604.000	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	
	Persentase Keluarga Beresiko Stunting yang Mendapatkan Pendampingan (%)	62,99	62,99		63		63,02		63,05		63,05			

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				160.055.000		168.058.000		176.461.000		185.284.000		194.549.000		
Terlaksananya kegiatan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) (%)	83,68	83,68	160.055.000	83,82	168.058.000	83,76	176.461.000	85,36	185.284.000	85,36	194.549.000		
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				4.760.000		4.998.000		5.248.000		5.510.000		5.786.000		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	12	12	4.760.000	12	4.998.000	12	5.248.000	12	5.510.000	12	5.786.000		DINKESPPKB
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				150.000.000		157.500.000		165.375.000		173.644.000		182.326.000		
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	32	15	150.000.000	15	157.500.000	15	165.375.000	15	173.644.000	15	182.326.000		DINKESPPKB

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				5.295.000		5.560.000		5.838.000		6.130.000		6.437.000		
Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	1	1	5.295.000	1	5.560.000	1	5.838.000	1	6.130.000	1	6.437.000		DINKESPPKB
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				5.096.688.000		5.351.522.000		5.619.098.000		5.900.053.000		6.195.055.000		
Terlaksananya peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	Persentase organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga	100	100	5.096.688.000	100	5.351.522.000	100	5.619.098.000	100	5.900.053.000	100	6.195.055.000		
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				2.304.000.000		2.419.200.000		2.540.160.000		2.667.168.000		2.800.526.000		
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	2.304	2.304	2.304.000.000	2.304	2.419.200.000	2.304	2.540.160.000	2.304	2.667.168.000	2.304	2.800.526.000		DINKESPPKB

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				2.768.400.000		2.906.820.000		3.052.161.000		3.204.769.000		3.365.008.000		
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	769	769	2.768.400.000	769	2.906.820.000	769	3.052.161.000	769	3.204.769.000	769	3.365.008.000		DINKESPPKB
2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				7.538.000		7.915.000		8.311.000		8.727.000		9.163.000		
Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	5	5	7.538.000	5	7.915.000	5	8.311.000	5	8.727.000	5	9.163.000		
2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga				16.750.000		17.587.000		18.466.000		19.389.000		20.358.000		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	1	1	16.750.000	1	17.587.000	1	18.466.000	1	19.389.000	1	20.358.000		DINKESPPKB

4.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga mendukung pelaksanaan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati pada program prioritas Kabupaten Purbalingga. Penjelasan pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1	Peningkatan kelas layanan puskesmas	Meningkatnya jumlah puskesmas rawat inap	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: – Pengembangan Puskesmas	Puskesmas rawat jalan menjadi Puskesmas Rawat inap dari total eksisting 11 Puskesmas rawat inap menjadi 13 Puskesmas rawat inap
		Meningkatnya jumlah Puskesmas PONED	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Sub Kegiatan: – Pembangunan Puskesmas – Pengembangan Puskesmas	Puskesmas mampu persalinan menjadi Puskesmas PONED, dari total eksisting 5 Puskesmas menjadi 7 Puskesmas
2	Pembangunan fasilitas layanan kesehatan rujukan layanan guna pemerataan akses layanan bagi masyarakat	Meningkatnya pemerataan akses layanan bagi masyarakat	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Sub Kegiatan: – Pembangunan Rumah Sakit	Pembangunan RSUD tipe D di Kecamatan Rembang
3	Layanan kesehatan gratis di RSUD dan seluruh puskesmas untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat	Meningkatnya pemerataan akses layanan bagi masyarakat	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Sub Kegiatan:	Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis sejalan dengan program nasional dan antar jemput kegawatdaruratan

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			<p>– Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</p> <p>Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan: – Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</p>	
4	Perlindungan Kesehatan Semesta	Meningkatnya pemerataan akses layanan bagi masyarakat	<p>Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan: – Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</p>	Pelayanan pengusulan peserta PBPB BP Pemda/PBI APBD 2 melalui mekanisme pemenuhan <i>Universal Health Coverage/UHC</i>
5	Pemberdayaan kader kesehatan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	<p>Kegiatan: Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan: - Bimbingan Teknis dan</p>	Pembinaan kader kesehatan

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
6	Fasilitasi Kecamatan Berdaya	Meningkatnya pemerataan akses layanan bagi masyarakat	<p>Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan: - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</p> <p>Kegiatan: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Sub kegiatan: - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	Pendampingan pelaksanaan Posyandu ILP, Koordinasi Tim Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten Dalam Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan
7	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui program beasiswa, pelatihan dan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	<p>Kegiatan: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>	Pelatihan tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
	peningkatan layanan kesehatan		Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Sub kegiatan: - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat tercapai.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya dan biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam

lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Selanjutnya indikator kinerja harus memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INDIKATOR KINERJA URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH										
Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan										
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Persen	74,19	74,23	74,61	74,99	75,37	75,74	76,12	IKU PD
2	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Persen		87,31	87,81	88,31	88,81	89,31	89,81	IKU PD
3	Persentase Penurunan Kasus Kematian Ibu	Per 1000 KH	18,18	9,09	10,00	10,00	11,11	11,11	12,50	IKU PD
4	Angka Kematian Balita	Persen	15,76	15,3	14,8	14,5	14,3	14	13,8	IKU PD
5	Prevalensi Stunting	Persen	26	22,1	21,98	20,86	19,75	18,63	17,5	IKU PD
6	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	Persen		81,82	82,61	86,96	91,30	95,65	100	IKU PD
7	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	persen		9,09	13,04	17,39	21,74	26,09	30,43	IKU PD

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Jumlah Penduduk	Persen		2,43	2,47	2,5	2,53	2,56	2,59	IKU PD
9	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Makanan Minuman yang Memenuhi Standar	Angka	69,52	88,31	94,21	94,55	96,39	96,54	96,71	IKU PD
10	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka	73,81	74	74,31	74,41	74,51	74,61	74,71	IKU PD
Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar Kesehatan										
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	per 1000	1	1	1	1	1	1	1	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Persentase Rumah Sakit Rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
15	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen		12,1	11,9	11,7	11,5	11,3	11,1	EPPGBM
1	<i>Net Death Rate</i> (NDR) Rumah Sakit	permil	11	10,9	10,8	10,7	10,6	10,5	10,4	RIBK
2	<i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR) Rumah Sakit	persen	68,9	65	65	66	67	68	69	
3	<i>Average Lenght of Stay</i> (ALOS) Rumah Sakit	hari	3	3	3	3	3	3	3	
4	<i>Turn Over Interval</i> (TOI) Rumah Sakit	hari	1	3	3	2	2	1	1	
5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olehan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	persen		83,5	84	84,5	85	85,5	85,5	RIBK
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana										

Renstra DINKESPPKB Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	63,03	65,08-65,11	65,85-65,89	66,61-66,68	67,38-67,47	68,14-68,26	68,91-69,04	IKU PD
2	Rata-rata Angka Kelahiran Total / TFR	Angka	2,1	2,17-2,1	2,16-2,09	2,16-2,09	2,15-2,08	2,14-2,08	2,13-2,07	IKU PD
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,1	2,17-2,1	2,16-2,09	2,16-2,09	2,15-2,08	2,14-2,08	2,13-2,07	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	34,76	34,85	34,95	35,05	35,15	35,25	35,35	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
3	Persentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	7,60	7,50	7,30	7,10	6,90	6,70	6,50	Permendagri 19/2024 (IKK Outcome)
4	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	58,4	59,6	60,7	61,7	62,7	63,7	64,6	Kemensos

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 merupakan pedoman yang komprehensif dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Purbalingga selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, penyusunan Renstra ini juga memperhatikan dan selaras dengan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), yang merupakan rencana jangka panjang pembangunan kesehatan nasional. Keselarasan dengan RIBK ini menjadi penting agar arah kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Purbalingga tetap terintegrasi dengan kebijakan nasional, terutama dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, transformasi sistem kesehatan, serta target-target prioritas nasional di bidang kesehatan.

Renstra ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai panduan aksi yang mampu menggerakkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan dan peningkatan kualitas keluarga. Dengan keselarasan terhadap RIBK, RPJMN, dan RPJMD, maka arah pembangunan kesehatan dan peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Purbalingga akan lebih terfokus, terarah, dan memiliki kesinambungan jangka panjang.

Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga akan terus melakukan penyesuaian kebijakan dan inovasi sesuai dengan dinamika permasalahan kesehatan, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Penyuluh Keluarga Berencana, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan pada tahun 2029 Kabupaten Purbalingga dapat mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, tangguh, dan berdaya saing.

Melalui pelaksanaan Renstra yang konsisten dan berbasis bukti, Kabupaten Purbalingga akan berkontribusi secara nyata dalam pencapaian target pembangunan kesehatan nasional sekaligus pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk peningkatan kualitas keluarga.